

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL PERTANIAN  
DI KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2008 - 2012**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD MARYONO S**

**NIM: 018399129**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2014**

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 adalah hasil karya saya sendiri, seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 14 Maret 2014  
Yang menyatakan,

**MUHAMMAD MARYONO S.**  
NIM. 018399129

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Penyusun TAPM : MUHAMMAD MARYONO S.

NIM : 018399129

Program Studi : Magister Administrasi Publik

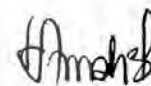
Hari/Tanggal :

Menyetujui,  
Pembimbing I,



Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.  
NIP. 19650827 199103 1 001

Menyetujui,  
Pembimbing II,



Dr. Ir. Amalia Sapriati, M.A  
NIP. 19600821 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP/  
Program Magister Administrasi Publik,      Direktur Program Pascasarjana,



Florentina Ratih Wulandari, SIP, M.Si.  
NIP. 19710609 199802 2 001



Suciati, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : MUHAMMAD MARYONO S.

NIM : 018399129

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Maret 2014

W a k t u : 13.00 - 15.00 WIB

dan telah dinyatakan Lulus

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Komisi Penguji : Dr. Tita Rosita, M.Pd.

()

Penguji Ahli : Prof. Ngadisah, MA.

()

Pembimbing I : Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.

()

Pembimbing II : Dr. Amalia Sapriati, MA.

()

## ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan  
Tahun 2008-2012

**Muhammad Maryono S.**  
**Universitas Terbuka**  
**yoyons@gmail.com**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, manfaat dan keberhasilan serta mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan. Lokus penelitian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2008 - 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pertanian telah berjalan seperti apa yang diharapkan perumus kebijakan. Hal tersebut dinyatakan secara positif dari indikator efektivitas : realisasi kegiatan bantuan sosial antara 95,07% - 100%, efisiensi : efisiensi biaya 0,83% - 15,01%, responsivitas : dengan 70,73% personil dengan pendidikan S1 dan ketepatan : 52% pernyataan setuju dengan ketepatan program bantuan sosial pertanian. Pada indikator pemerataan belum bisa dilaksanakan program ini. Manfaat dan Keberhasilan bantuan sosial kebijakan bantuan sosial pertanian dapat dilihat pada indikator efektivitas : program tersebut dapat memperbesar peranan petani dalam mengelola bantuan, efisiensi : rata-rata nilai efisiensi 6,44%, responsivitas : bantuan yang telah diberikan tidak disia-siakan dan tetap dimanfaatkan oleh petani dan indikator ketepatan : adanya peningkatan produksi padi sebesar 3,53% - 9,58%, kecuali indikator pemerataan belum terlihat adanya manfaat dan keberhasilan program bantuan sosial pertanian. Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan antara lain; 1) Peran aktif dan keterlibatan langsung petani dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian; 2) Proses seleksi sesuai prosedur; 3) Letak geografis daerah/kecamatan penerima bantuan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian; dan 4) Sumber daya manusia pengelola atau petugas pelaksana. Hal tersebut di atas menunjukkan masih diperlukannya program bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan, dengan perlunya perbaikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan prasarana dan sarana akses jalur transportasi dan distribusi ke daerah-daerah pedalaman.

Kata kunci : *Bantuan Sosial Pertanian, Kebijakan Publik, Kelompok Tani*

## ABSTRACT

Evaluation of Agricultural Policy of Social Assistance in Nunukan  
year 2008-2012

**Muhammad Maryono S.**

**Universitas Terbuka**

[yoyons@gmail.com](mailto:yoyons@gmail.com)

This study aims to analyze the implementation, benefits and success as well as identifying the things that affect the implementation of the agricultural social assistance in Nunukan. Locus Research is a Department of Agriculture and Animal Husbandry Nunukan within 5 (five) years from fiscal year 2008 - 2012. The method used in this research is descriptive qualitative. The data used are primary and secondary data. The primary data obtained through interviews using an interview guide. Secondary data was obtained through a review of documents related to the research focus. The results showed the implementation of the agricultural policy of social assistance has been running as expected policy makers. It was stated in a positive of the effectiveness indicators: the realization of social assistance activities between 95.07% - 100%, efficiency: cost efficiency of 0.83% - 15.01%, responsiveness: with 70.73% of personnel with SI and accuracy: 52% agree with the statement of precision agriculture program of social assistance. On indicators of equity can not be implemented this program. The success of social assistance benefits and social assistance agricultural policy can be seen in indicators of effectiveness: the program can increase farmers' role in aid management, efficiency: the average value of 6.44% efficiency, responsiveness: aid that has been wasted and still used by farmers and accuracy indicator: an increase in rice yield by 3.53% - 9.58%, unless equity indicators have not seen the benefits and success of the agricultural social assistance programs. The things that affect the implementation of social assistance in Nunukan agriculture, among others; 1) The role of active and direct involvement of farmers in the agricultural activities of social assistance; 2) Selection Process according to procedure; 3) The geographical location of the area / district beneficiary effect on the agricultural activities of social assistance; and 4) Human resources managers or executive officers. The foregoing shows is the need for social assistance programs in Nunukan agriculture, with the need to improve human resource capacity building and improvement of infrastructure and transportation access and distribution to inland areas.

*Keywords: Agricultural Social Assistance, Public Policy, Farmers Group*

## KATA PENGANTAR

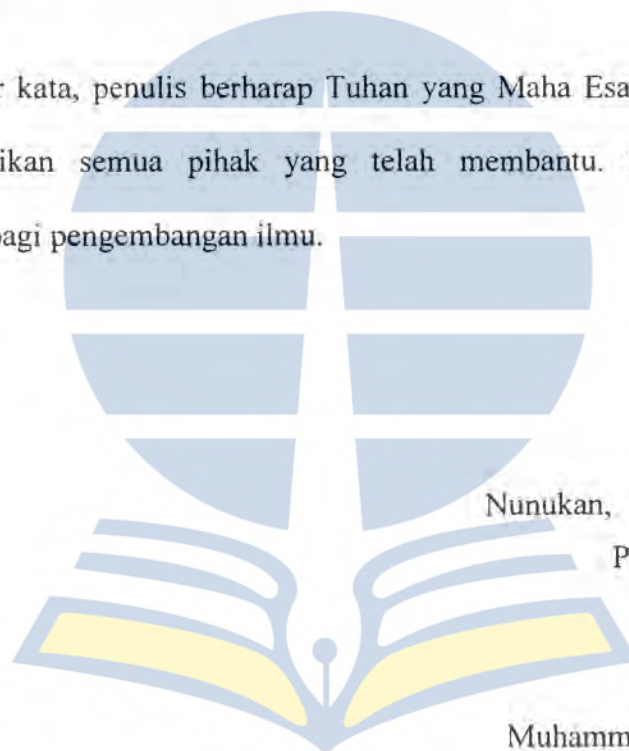
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini banyak menemukan hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan TAPM ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Kepala UPBJJ-UT Samarinda yang telah memberikan dukungan dan fasilitas pembelajaran di Pokjar Nunukan.
3. Dr. Samodra Wibawa, M.Sc., selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan semangat sehingga penulisan ini diselesaikan.
4. Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA., selaku Pembimbing II atas segala masukan dan pengarahan dalam penyusunan TAPM ini.

5. Bapak Bupati Nunukan, yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka.
6. Istri dan anak-anak saya tercinta, yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan do'a
7. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Terbuka Magister Administrasi Publik Nunukan atas bantuan dan kerjasamanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.



Nunukan, Maret 2014  
Penulis,

Muhammad Maryono S.



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
<u>LEMBAR PERSETUJUAN TAPM</u> .....	iii
<u>PENGESAHAN</u> .....	iii
<u>ABSTRAK</u> .....	iv
<u>ABSTRACT</u> .....	v
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	vi
<u>DAFTAR ISI</u> .....	viii
<u>DAFTAR GAMBAR</u> .....	x
<u>DAFTAR TABEL</u> .....	xi
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u> .....	xiv
<b>I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>II</b> <b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kebijakan Publik .....	10
B. Pelaksanaan Kebijakan dan Hal-hal yang Mempengaruhinya .....	18
C. Pengukuran Manfaat dan Keberhasilan Kebijakan .....	22
D. Kerangka Pikir .....	24
E. Definisi Konseptual dan Operasional .....	25

III	METODOLOGI PENELITIAN .....	27
A.	Metode Penelitian.....	27
B.	Narasumber dan Bahan Studi.....	29
C.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
D.	Metode Pengumpulan Data.....	300
E.	Metode Analisis Data.....	31
IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A.	Gambaran Umum .....	33
B.	Pelaksanaan dan Hal-hal yang Mempengaruhi Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian .....	45
1.	Isi atau <i>Content</i> Kebijakan .....	45
2.	Pelaksana dan Kelompok Sasaran .....	60
3.	Lingkungan .....	65
C.	Manfaat dan Keberhasilan Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian .....	67
1.	Efektivitas .....	68
2.	Efisiensi.....	93
3.	Pemerataan.....	96
4.	Responsivitas .....	100
5.	Ketepatan .....	104
V	SIMPULAN DAN SARAN .....	108
A.	Simpulan.....	108
B.	Saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA .....	112
	LAMPIRAN .....	117

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir .....	25
Gambar 4.1. Organisasi Pelaksana Bantuan Sosial Pertanian .....	61
Gambar 4.2. Realisasi Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Per Subsektor tahun 2008-2012 (dalam %) .....	91
Gambar 4.3 Sebaran Penerima dan Lokasi Penyaluran Bantuan Sosial Pertanian Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2009 .....	97



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2008-2012 (persen) .....	1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2010-2012 .....	2
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah Tahun 2008-2012 .....	3
Tabel 1.4	Anggaran Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan (dalam rupiah) .....	6
Tabel 2.1.	Kriteria Evaluasi .....	17
Tabel 4.1.	Luas Per Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk dan kepadatan Penduduk di Kabupaten Nunukan .....	344
Tabel 4.2.	Luas Lahan Sawah, Produksi Dan Produktivitas Padi Di Kabupaten Nunukan .....	355
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan .....	400
Tabel 4.4.	Tujuan Bantuan Sosial Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2008-2012 .....	46
Tabel 4.5.	Indikator Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 .....	55
Tabel 4.6.	Indikator Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 .....	56
Tabel 4.7.	Indikator Kegiatan Subsektor Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 .....	577
Tabel 4.8.	Indikator Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 .....	58
Tabel 4.9.	Indikator Kegiatan Subsektor PPHP di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 .....	59

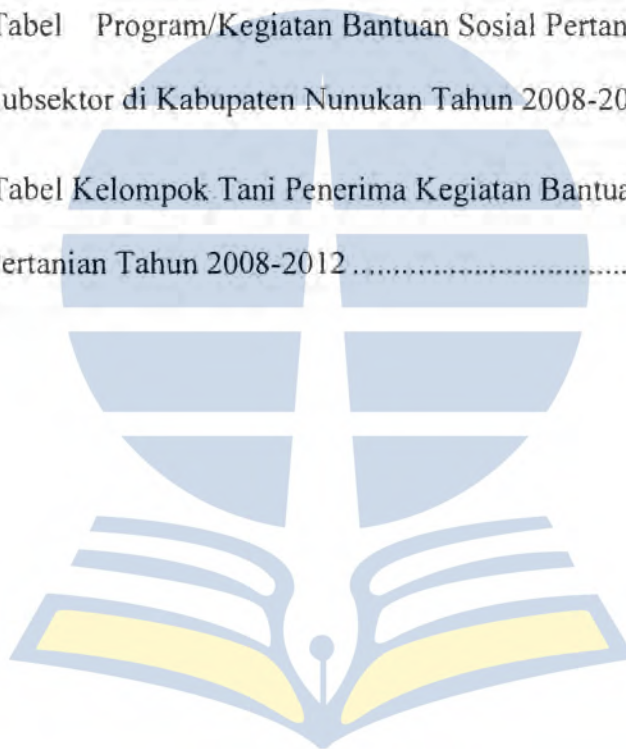
Tabel 4.10.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 .....	69
Tabel 4.11.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 .....	70
Tabel 4.12.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2010 .....	71
Tabel 4.13.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 .....	72
Tabel 4.14.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 .....	73
Tabel 4.15.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 .....	74
Tabel 4.16.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2010 .....	75
Tabel 4.17.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 .....	76
Tabel 4.18.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 .....	788
Tabel 4.19.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 .....	79
Tabel 4.20.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 .....	80
Tabel 4.21.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2009 .....	82
Tabel 4.22.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2010 .....	83
Tabel 4.23.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 .....	85
Tabel 4.24.	Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 .....	87

Tabel 4.25. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 .....	90
Tabel 4.26. Pencapaian Realisasi Keuangan Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012 (Jutaan rupiah) .....	91
Tabel 4.27. Pencapaian Realisasi Keuangan Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012 .....	95
Tabel 4.28. Pernyataan Terhadap Indikator Pemerataan .....	99
Tabel 4.29. Pernyataan Terhadap Indikator Responsivitas .....	101
Tabel 4.30. Pernyataan Terhadap Indikator Ketepatan .....	105



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Biodata Peneliti .....	117
Lampiran 2 Formulir Kuesioner .....	118
Lampiran 3 Formulir Wawancara .....	120
Lampiran 4 Tabel Program/Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Per Subsektor di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012 .....	122
Lampiran 5 Tabel Kelompok Tani Penerima Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Tahun 2008-2012 .....	125



## II PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang masih menghadapi permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, politik maupun bidang-bidang lainnya. Kemiskinan dan pengangguran yang diakibatkan oleh bergesernya pembangunan sektor pertanian adalah beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan dalam produk domestik bruto yang menduduki posisi pertama dengan sumbangan terbesar, kemudian posisi ke dua ditempati oleh sektor pertanian dan posisi ketiga diduduki oleh sektor perdagangan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Struktur Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2008-2012 (persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012 (1)
Pertanian	14,5	15,3	15,3	14,7	15,0
Pertambangan dan Penggalian	10,9	10,6	11,1	11,9	12,5
Industri Pengolahan	27,8	26,2	24,8	24,3	23,6
Listrik, Gas dan Air	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
Bangunan	8,5	9,9	10,3	10,2	10,2
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,0	13,3	13,7	13,8	13,7
Angkutan dan Komunikasi	6,3	6,3	6,6	6,6	6,5
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Jasa-jasa	9,7	10,2	10,2	10,5	10,6

Sumber: BPS (2012)



Perubahan struktur pembangunan mempengaruhi distribusi pendapatan di berbagai sektor usaha, tidak terkecuali dalam penggunaan tenaga kerja. Pada Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2012 menyatakan bahwa, sektor industri yang berkontribusi 23,6 persen tahun 2012 hanya menyerap tenaga kerja sebesar 14,21 juta orang, dibandingkan dengan tenaga kerja sektor pertanian tahun 2012 yang justru masih menyerap tenaga kerja sebesar 41,21 juta tenaga kerja.

Tabel 1.2 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2010-2012

Lapangan Pekerjaan Utama	2010		2011		2012
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Pertanian	42,83	41,49	42,48	39,33	41,20
Industri Pengolahan	13,05	13,82	13,70	14,54	14,21
Konstruksi	4,84	5,59	5,59	6,34	6,10
Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,21	22,49	23,24	23,40	24,02
Angkutan dan Komunikasi	5,82	5,62	5,58	5,08	5,20
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,64	1,74	2,06	2,63	2,78
Jasa-jasa	15,62	15,96	17,02	16,65	17,37
Lainnya *)	1,40	1,50	1,61	1,70	1,92

\*) Mencakup 1. Pertambangan dan Penggalian; 2. Listrik, Gas dan Air Bersih

Sumber : BPS, (2012)

Secara nyata dapat dijelaskan bahwa tingkat produktivitas yang rendah serta penerimaan pendapatan yang sangat rendah terjadi di sektor pertanian juga turut mempengaruhi penggunaan tenaga kerja di sektor usaha masing-masing, sehingga yang terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk

miskin. Hasil perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun baik di kota maupun di desa terus menurun. Pada periode 2008 hingga 2012 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 34,96 juta jiwa menjadi 29,13 juta jiwa. Sementara persentase laju pertumbuhan penduduk miskin juga mengalami penurunan. Selain itu, pada periode yang sama tahun 2008 sampai 2012 dapat terlihat bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak di daerah perdesaan daripada di perkotaan.

Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
2012	10,65	18,48	29,13	8,78	15,12	11,96

Sumber: Bappeda Kabupaten Nunukan, 2012

Ini membuktikan bahwa desa masih menjadi pusat kemiskinan. Dilihat dari sisi mata pencaharian penduduk desa, dapat dikatakan kemiskinan mayoritas terjadi pada penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini selaras dengan pernyataan Menteri Pertanian pada suatu kesempatan bahwa 70 persen masyarakat miskin Indonesia adalah

petani, terutama buruh tani yang jumlahnya sangat besar dan memang rawan terhadap kemiskinan. Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Menurut Nugrayasa (2012), beberapa masalah pertanian yang dimaksud yaitu **pertama** yaitu masalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan dan pertanian kita sudah mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik. Berbagai hasil riset mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif di Indonesia, terutama di Pulau Jawa telah menurun produktivitasnya, dan mengalami degradasi lahan terutama akibat rendahnya kandungan C-organik dalam tanah. Sementara itu, dari sisi kuantitasnya terus terjadi pengurangan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bangunan dan industri. **Kedua**, masalah ketersediaan air. Pasalnya, dari total areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 ha, sumber airnya 11 persen (797.971 ha) berasal dari waduk, sementara 89 persen (6.432.212 ha) berasal dari non-waduk. Kondisi pada saat ini 73,24 % waduk kurang atau tidak berfungsi dan 19 waduk masih berstatus normal. Selain itu masih rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan di daerah-daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk. Selanjutnya, **masalah ketiga** adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Tidak semua teknologi dapat diadopsi dan diterapkan

begitu saja karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara kita, bahkan kondisi lahan pertanian di tiap daerah juga berbeda-beda. Teknologi tersebut harus dipelajari, dimodifikasi, dikembangkan, dan selanjutnya baru diterapkan ke dalam sistem pertanian kita. Hal lainnya sebagai masalah **keempat**, muncul dari terbatasnya akses permodalan. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan pengembangan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah (*low cost production*) yang sudah berjalan ditingkat petani. Selain itu, penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya diperluas. Yang terakhir, masalah **kelima** adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan. Pada dasarnya komoditas pertanian itu memiliki beberapa sifat khusus, baik untuk hasil pertanian itu sendiri, untuk sifat dari konsumen dan juga untuk sifat dari kegiatan usaha tani tersebut, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha tani diharapkan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin, dengan

memanfaatkan lembaga pemasaran baik untuk pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahannya.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan keterbatasan akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya infrastruktur pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan dalam bentuk belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan bencana di bidang pertanian. Terkait dengan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, Kementerian Pertanian menyalurkan belanja bantuan sosial melalui transfer uang dan atau transfer barang kepada kelompok tani, agar mampu secara mandiri dan bersama-sama meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Tabel 1.4 Anggaran Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan (dalam rupiah)

No.	Tahun	Anggaran
1.	2008	Rp. 3.189.435.000
2.	2009	Rp. 6.647.929.000
3.	2010	Rp. 1.504.625.000
4.	2011	Rp. 2.600.750.000
5.	2012	Rp. 5.298.200.000
Jumlah		Rp. 19.240.939.000

Sumber: Laporan Akhir Dinas Pertanian

Kabupaten Nunukan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 turut mengambil peran dalam peningkatan kesejahteraan petani yaitu turut melaksanakan program bantuan sosial pertanian berupa kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pertanian. Jumlah bantuan yang telah diberikan Kementerian Pertanian ke Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah senilai Rp. 19.240.939.000,- (Tabel 1.4) dengan frekuensi 180 kegiatan, jumlah bantuan yang telah diberikan tersebut adalah nilai yang tidak sedikit dan tidak sedikit pula petani dan kelompok tani yang telah menerima bantuan tersebut. Dengan jumlah kelompok tani dan petani di Kabupaten Nunukan yang mencapai 315 kelompok dan 6.824 petani (Dinas Pertanian Kalimantan Timur, 2012), bantuan yang telah tersalurkan tersebut masih belum bisa menyentuh seluruh petani dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Nunukan, sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan di antara petani dan kelompok tani dan gejolak di masyarakat.

Sementara itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bantuan sosial, pelaksanaan bantuan sosial tidak saja bermanfaat bagi petani tetapi juga berhasil dilaksanakan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan beberapa pemberitaan di media, salah satunya adalah seperti yang di kutip dari [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) :

“Dana bansos (bantuan sosial) menjadi sumber paling empuk untuk melakukan penyimpangan, ujar wakil ketua KPK M. Jasin .....”

Gencarnya pemberitaan “miring” tentang bantuan sosial pertanian dan pengalaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan membuat kebijakan bantuan sosial pertanian menarik untuk dikaji lebih mendalam.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, dikemukakan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan?
2. Apa saja manfaat dan keberhasilan kebijakan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan?
3. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan.

2. Menganalisis manfaat dan keberhasilan program Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan.
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai program bantuan sosial pertanian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaksanaan program bantuan sosial pertanian.



## II LANDASAN TEORI

### A. Kebijakan Publik

Nugroho (2012) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah respon suatu bangsa dan negara terhadap suatu masalah, atau kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama yang disebut sebagai negara dan bangsa. Hal senada juga disampaikan Dye, (dalam LAN, 2008) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*whatever Governments choose to do or not to do*" (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Kebijakan publik dalam pengertian bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa pilihan pemerintah, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketetapan dari pejabat tinggi seperti Presiden atau Menteri sebagai pembantu presiden, namun juga sikap diamnya dari pemerintah termasuk kebijakan publik, dalam arti tidak memberikan tanggapan apa-apa terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya, ketika krisis moneter terjadi, maka kelangkaan bahan pokok pangan terjadi di mana-mana, akibatnya timbul keresahan dalam masyarakat yang dengan sendirinya akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara, namun pemerintah tidak melakukan apa-apa seperti kebijakan terhadap peristiwa tersebut, maka sikap diamnya pemerintah itu dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan publik juga.

Sementara itu Easton, (dalam LAN, 2008) menekankan bahwa *“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society.”* Kebijakan publik itu adalah kewenangan dari pemerintah, jadi hanya pemerintahlah yang berhak mengeluarkan semacam peraturan dan perundang-undangan untuk kemaslahatan masyarakat. Hampir sama dengan Dye, Easton menjelaskan kebijakan publik sebagai bentuk apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jadi dapat disimpulkan tujuan kebijakan publik tersebut adalah untuk menjawab atau merumuskan serta memecahkan permasalahan-permasalahan publik yang muncul dari tuntutan masyarakat dalam bentuk alokasi nilai yang sifatnya otoritas dari pemerintah untuk diterapkan pada masyarakat. Seperti kebijakan bantuan sosial pertanian, merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam membantu usaha tani masyarakat agar mencapai produksi yang optimal, di samping meningkatkan taraf hidup masyarakat (petani), dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang sehat dan gizi yang seimbang, baik kualitas maupun kuantitasnya, seperti kebutuhan pokok manusia akan pangan. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah lebih memilih substansi pada petani berupa bantuan untuk budidaya komoditas pertanian baik di sawah-sawah maupun di ladang para petani. Seperti untuk pembelian pupuk, bibit, sarana produksi dan upah menggarap lahannya, dengan harapan dapat meningkatkan hasil/produksi para petani.

Menurut Dunn (2000), evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Tetapi evaluasi tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan, tetapi evaluasi juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan selanjutnya. Wibawa (1994), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu :

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan.

Evaluasi merupakan salah satu dari prosedur dalam analisis kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan publik pada hakikatnya menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia (Dunn, 2000) yaitu definisi (perumusan masalah), prediksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi), dan evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari yang berfungsi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa "evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan." Hal ini berbeda dengan monitoring dimana monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan (Subarsono, 2006). Mustopadidjaja (2005) mengatakan bahwa "evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu." Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan, seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran

yang ingin dipengaruhi, instrumen kebijakan yang dipergunakan, respon dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan merupakan bagian dari evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Esensi dari evaluasi menurut buku SANKRI (LAN, 2005) adalah untuk menyediakan umpan balik (*feedback*), yang mengarah pada hasil yang baik (*successful outcomes*) menurut ukuran nyata dan obyektif. Pada hakikatnya, tujuan evaluasi adalah untuk perbaikan (bila perlu, bukan dalam rangka pembuktian/*to improve, not to prove*). Dua hal yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah : (1) Keluaran kebijakan (*policy output*), yaitu apa yang dihasilkan dengan adanya perumusan kebijakan; (2) hasil/dampak kebijakan (*policy outcomes/consequences*), yaitu akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan diterbitkan dan diimplementasikannya suatu kebijakan. Secara umum, tujuan evaluasi menurut Mark (2000) ada empat: Penilaian terhadap unggulan dan nilai (*assessment of merit and worth*), yaitu mengembangkan penilaian-penilaian yang dapat dipercaya, pada tingkat individu dan masyarakat, dari suatu kebijakan atau program. Penyempurnaan program dan organisasi (*program and organizational improvement*), yaitu usaha untuk menggunakan informasi yang secara langsung memodifikasi dan mendukung operasi program. Kekeliruan dan kesesuaian (*oversight and compliance*), penilaian

terhadap perluasan dari program seperti status perintah, peraturan, aturan, mandat baku dan harapan formal lainnya. Pengembangan pengetahuan (*knowledge development*), pemeriksaan atau pengujian teori umum, proposisi hipotesis dalam konteks kebijakan dan program.

Edward A. Suchman dalam Nugroho (2012), mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Sedangkan jenis-jenis evaluasi kinerja kebijakan menurut Bingam dan Felbinger dalam Nugroho (2012) dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar :

1. Evaluasi proses, meliputi: Evaluasi implementasi, memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara hal-hal yang telah direncanakan dan realita, upaya menjaga agar kebijakan/program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rancangan dan bila diperlukan dapat dilakukan modifikasi dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan.

2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan
3. Evaluasi kebijakan, memfokuskan pada kegiatan pemantauan indikator-indikator dari kemajuan pencapaian tujuan kebijakan.
4. Evaluasi meta-evaluasi, dilakukan dalam rangka menetapkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Weis seperti yang dikatakan oleh Widodo (2008) menjabarkan bahwa terdapat beberapa tahap dalam evaluasi kebijakan:

1. *Formulating the program goals that the evaluation will use as criteria.*
2. *Choosing among multiple goals.*
3. *Investigating unanticipated consequences.*
4. *Measuring outcomes.*
5. *Specifying what the program is*
6. *Measuring program inputs and intervening processes.*
7. *Collecting the necessary data.*

Dengan mengacu pada uraian sebelumnya maka menurut Widodo (2008) untuk melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan :

- a. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan.

- b. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
- c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
- d. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, data dicari di lapangan.
- e. Hasil data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Sedangkan kriteria / indikator evaluasi menurut Dunn (2000) sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kriteria Evaluasi

Tipe kriteria	Pertanyaan
1. Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai
2. Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda
5. Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu
6. Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai ?

Sumber : Dunn, 2000



## B. Pelaksanaan Kebijakan dan Hal-hal yang Mempengaruhinya

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2012).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun

sumberdaya materi (material resources) dan sumberdaya metoda (method resources). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.
4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan

kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kurniawan (2009) merumuskan faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Isi atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah

dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.

2. Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

### C. Pengukuran Manfaat dan keberhasilan Kebijakan

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama menerapkan kebijakan Bantuan Sosial Pertanian dalam upaya membantu petani agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian, dengan cara itu diharapkan dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani, yang mayoritas penduduk perdesaan dan tergolong di bawah garis kemiskinan. Pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air merupakan bagian integral dan merupakan salah satu pendukung penting bagi pembangunan pembangunan sektor pertanian yang meliputi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan maupun Perkebunan. Namun demikian, infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya tidak murah tersebut seringkali kurang dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Hal ini karena peran petani selama ini dalam pembangunan infrastruktur tersebut relatif pasif dan seakan hanya merupakan objek pembangunan dimana pelaksanaan konstruksi umumnya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Keterlibatan petani yang kurang dalam proses pengambilan keputusan baik pada tahap awal saat prasurevey, investigasi, desain, maupun konstruksi cenderung mengakibatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap bangunan yang ada sangatlah minim.

Sementara itu di sisi lain sebagian kalangan menyatakan, bahwa hanya sebagian kecil saja dana pembangunan dari pemerintah yang dapat menyentuh dan dinikmati rakyat kecil seperti petani dan buruh tani. Sangat

disadari bahwa selama ini hanya kalangan pengusaha saja yang menikmati sebagian besar kue pembangunan itu (Ananto, 2008).

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas maka diambil suatu kebijakan bahwa pelaksanaan konstruksi infrastruktur pertanian untuk beberapa kegiatan lingkup Kementrian Pertanian, sejauh tidak memerlukan teknologi canggih dan alat-alat berat, dilakukan dengan pola bantuan sosial produktif. Infrastruktur pengelolaan lahan dan air tersebut misalnya jalan usaha tani, jalan produksi, sumur resapan, embung, bangunan konservasi tanah, jaringan irigasi tingkat usaha tani, dam parit.

Menurut pendapat Syahyuti (2012), berbeda dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang ada saat ini, kebijakan ini di samping merupakan wujud kepedulian dan keberpihakan sektor pertanian terhadap petani dan buruh tani juga merupakan upaya untuk mereposisi petani sebagai pelaku atau subjek pembangunan. Diharapkan kebijakan ini akan menciptakan kebersamaan dan rasa tanggung jawab secara kolektif terhadap infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang telah mereka bangun. Di samping itu, dengan adanya bantuan sosial pertanian akan membuka lapangan pekerjaan baru pada saat tidak ada kegiatan atau pekerjaan yang berarti di lahan usaha taninya (*off-season job opportunity*).

Pada gilirannya kegiatan bantuan sosial pertanian produktif ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan dan nilai tambah bagi peserta

bantuan sosial pertanian saja namun juga bermanfaat bagi masyarakat perdesaan setempat dengan dampak *multiple effects*-nya baik secara ekonomi maupun sosial. Melalui kegiatan ini diharapkan infrastruktur pengelolaan lahan dan air, yang telah dibangun atau direhabilitasi yang merupakan buah karya petani dan buruh tani atau warga masyarakat perdesaan yang lemah perekonomiannya, dapat berfungsi lebih optimal dan lestari dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bukan saja subsektor tanaman pangan tetapi juga subsektor hortikultura, perkebunan maupun peternakan di lokasi setempat.

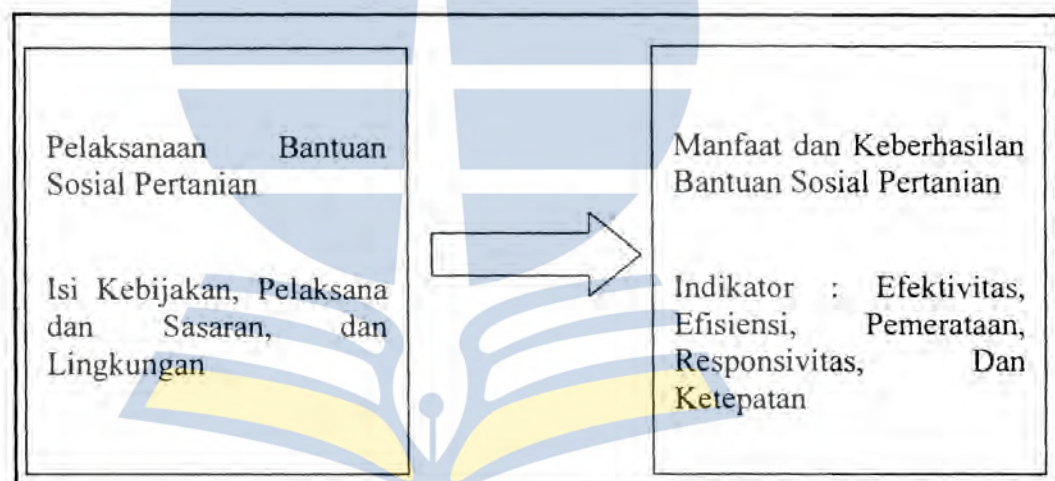
#### **D. Kerangka Pikir**

Salah satu tujuan dari program revitalisasi pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui aspek pendapatan. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah cukup besar dalam memberikan subsidi bahan bakar. Untuk itu, pemerintah berupaya mengurangi subsidi BBM agar APBN tidak mengalami defisit yang cukup besar. Kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut memicu kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan kenaikan harga barang lain seperti harga pangan, harga input pertanian dan lain-lain.

Demi mengimbangi kenaikan harga-harga input pertanian, pemerintah memberlakukan kebijakan kenaikan harga pokok penjualan (HPP) agar pendapatan petani tetap stabil. Adanya kebijakan HPP tersebut masih diragukan belum efektif dalam meningkatkan pendapatan petani. Agar kebijakan HPP

dapat terlaksana secara efektif, pemerintah melaksanakan program bantuan sosial pertanian.

Berdasarkan hal di atas penelitian ini berupaya menjawab beberapa tujuan yaitu bagaimana kebijakan, apa manfaat dan keberhasilan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan lima tahap evaluasi yaitu identifikasi tujuan, penjabaran tujuan, pengukuran indikator, pencapaian tujuan (data), dan komparasi.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## E. Definisi Konseptual dan Operasional

- a. Pelaksanaan Bantuan Sosial Pertanian adalah pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari



kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat dampak bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program. Untuk menguraikan apa saja yang ada dan terjadi pada pelaksanaan bantuan sosial pertanian maka akan diuraikan Isi atau *content* kebijakan, implementor (pelaksana) dan kelompok sasaran, dan Lingkungan.

- b. Manfaat dan keberhasilan kebijakan sosial pertanian adalah mengukur sejauh mana pelaksanaan atau realisasi dari kegiatan dalam pencapaian tujuan kebijakan program atau kegiatan bantuan sosial pertanian. Pengukuran pencapaian tujuan tersebut diuraikan dalam 5 (lima) indikator untuk dapat melihat manfaat dan keberhasilan kebijakan bantuan sosial pertanian. Kelima indikator tersebut adalah efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

### III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan pendekatan analisis kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan terhadap objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan kenyataan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara. Fokus permasalahan yang ingin digali adalah dalam pengertian bahwa evaluasi implementasi kebijakan dengan penekanan pendekatan prespektif apa yang terjadi, yakni ingin melihat pelaksanaan dari suatu implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan bantuan sosial pertanian.

Karena kajian penelitian ini pada evaluasi proses implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan sosial pertanian, maka yang lebih tepat dan layak sebagai narasumber tentu pihak-pihak yang berkepentingan dan mengetahui persoalan bantuan sosial pertanian, dengan demikian diharapkan akan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan reliabel.

Dengan demikian yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dan masyarakat atau petani penerima bantuan sosial pertanian. Narasumber tersebut dipilih karena kajian penelitian ini pada evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan sosial pertanian,

maka yang lebih tepat dan layak sebagai respondennya tentu pihak-pihak yang berkepentingan dan mengetahui persoalan bantuan sosial pertanian seperti yang disebutkan di atas, dengan demikian diharapkan akan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan reliabel dan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan waktu, tenaga dan biaya.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nunukan. Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pengumpulan data ke lapangan maka instrumen yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan observasi penelitian menggunakan alat bantu berupa buku catatan dan alat tulis. Aspek-aspek yang diobservasi antara lain meliputi : seleksi kelompok penerima bantuan, pedoman umum dan petunjuk teknis kegiatan bantuan sosial pertanian.
2. Pedoman wawancara yaitu berupa catatan pertanyaan tertulis mengenai pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai tata laksana administrasi, tata laksana pengoperasian, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan.

## **B. Narasumber dan Bahan Studi**

Narasumber penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan kepada petani, yaitu :

1. Kepala Dinas, sebagai penentu/pengambil kebijakan sektor pertanian di Kabupaten Nunukan
2. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pelaksana teknis kegiatan.
3. Petani sebagai penerima kegiatan bantuan sosial pertanian.

Bahan studi dokumentasi adalah semua bahan yang dapat memperjelas fokus penelitian, yaitu :

1. Laporan Akhir Kegiatan
2. Pedoman Umum, Pedoman Teknis, dan Petunjuk Pelaksanaan masing-masing subsektor.
3. Peraturan yang terkait dengan fokus penelitian

## **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2012 dengan lokasi penelitian adalah Kabupaten Nunukan.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi guna keperluan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), angket (*questioner*) dan teknik dokumentasi untuk mendapatkan informasi data sekunder.

1. Studi dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan tertulis serta berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam rangka memperoleh data sekunder menyangkut prosedur pelaksanaan bantuan sosial pertanian.
2. Observasi, merupakan teknik atau metode pengumpulan data serta informasi di luar narasumber, data dan informasi diperoleh melalui pengamatan dan wawancara yang diikuti dengan percakapan biasa.
3. Wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan teknik wawancara dengan bertanya dan bebas terhadap narasumber maupun informan. Dalam wawancara ini sebagaimana percakapan biasa dan tidak menutup kemungkinan sebagai wawancara “sambil lalu”. Metode ini untuk dapat mengungkap informasi lain yang sangat dibutuhkan yang diperkirakan sulit didapat jika dilakukan

dengan menggunakan wawancara (*questioner*) dan dari hasil ini akan dipergunakan untuk memperkaya dalam menganalisis data.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diambil dan dihimpun dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya setiap data akan diberikan penjelasan dan pada tahap akhir atau bersamaan dengan urai data akan diverifikasi dan analisis dengan memberikan uraian dan penafsiran dalam bentuk narasi.

Proses analisis data dilakukan melalui 3 jalur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis sebagai hasil-hasil dari wawancara mendalam di lapangan. Untuk menambah kevalidan data informasi tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan model narasi analitis atau triangulasi sebagaimana disebutkan oleh Moleong (2007). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

Selanjutnya dalam analisis ini penyajian data merupakan kegiatan analisis data berupa penyusunan atau penggabungan dari sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Sebagai tambahan keterangan akan dilengkapi dengan hasil wawancara dan teori yang mendukung.



## IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah daerah paling utara dari Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia sehingga menjadi daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antara kedua negara. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263,68 km<sup>2</sup> dan berdiri pada tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 berjumlah 154.269 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 10,83 jiwa/km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan.



Tabel 4.1. Luas Per Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk dan kepadatan Penduduk di Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Krayan	1 834,74	65	7 295	3,98
2.	Krayan Selatan	1 757,66	24	2 248	1,28
3.	Lumbis	290,23	28	4 966	17,11
4.	Lumbis Ogong	3 357,01	49	5 278	1,57
5.	Sembakung	2 042,66	20	8 519	4,17
6.	Nunukan	564,50	5	52 164	92,41
7.	Seimenggaris	850,48	4	7 673	9,02
8.	Nunukan Selatan	181,77	4	14 594	80,29
9.	Sebuku	1 608,48	10	10 044	6,24
10.	Tulin Onsoi	1 513,36	12	6 606	4,37
11.	Sebatik	4 51,07	4	4 266	83,53
12.	Sebatik Timur	39,17	4	11 499	293,57
13.	Sebatik Tengah	47,71	4	6 736	141,19
14.	Sebatik Utara	15,39	3	5 186	336,97
15.	Sebatik Barat	93,27	4	7 195	77,14
Jumlah		14.263,68	240	154 269	

Sumber : Nunukan dalam Angka, 2012.

Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Dari lima belas kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 336,97 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Sebatik Timur dengan kepadatan 293,57 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada hanya berkisar antara 1,28 – 141,19 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 4.2. Luas Lahan Sawah, Produksi Dan Produktivitas Padi Di Kabupaten Nunukan

<b>Luas Lahan Sawah</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
a. Irigasi (ha)	3.737	3.862	2.490	2.737	1.947	1.383
b. Tadah Hujan	5.681	6.206	6.246	6.681	6.051	5.576
<b>Produksi Padi (ton)</b>	43.89	48.07	39.75	43.56	38.50	39.86
<b>Produktivitas (ha)</b>	4,06	4,27	4,16	4,08	4,52	4,52

Sumber : Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, 2012.

Pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Nunukan. Pembangunan di bidang pertanian perlu ditingkatkan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan selalu diupayakan untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pada tahun 2011 luas panen padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan, dimana tanaman padi naik sebesar 3,52%. Otomatis produksi tanaman padi juga mengalami kenaikan, yaitu menjadi 39.836 ton dan terjadi kenaikan produktivitas padi sebesar 0,3%. Kecamatan Lumbis adalah daerah yang mempunyai luas panen dan jumlah produksi padi ladang yang lebih besar dibandingkan kecamatan yang lain, yaitu 55,92% dari total luas panen serta 55,36% dari total produksi.

## 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 25 SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan, tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah melakukan :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca panen;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi dan sumber daya ternak;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang informasi teknologi dan bina usaha;
- g. Pembina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Salah satu program dan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah penyaluran bantuan kepada petani. Kegiatan penyaluran bantuan kepada petani adalah fungsi yang sangat penting bagi keberadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dan menjadi indikator bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam membangun Kabupaten Nunukan.

### **3. Kebijakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Nunukan**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan akan diarahkan dan

apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Kabupaten Nunukan 2011-2016, yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, telah ditetapkan Visi sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Pertanian yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”***

Dalam visi Pembangunan Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016 tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang diberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Pertanian yang Tangguh**, artinya pertanian yang secara dinamis dan ulet mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya alam, tenaga, modal dan teknologi yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. **Mandiri**, artinya terjadinya kondisi kemandirian pangan di Kabupaten Nunukan pada bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berupa mandiri beras dan ubi kayu, di bidang hortikultura berupa mandiri dan mendukung penyediaan buah-buahan pisang,

durian, dan jeruk di Kalimantan Timur dan di bidang peternakan mandiri dalam penyediaan daging dan telur.

- c. **Berdaya Saing**, artinya produksi pertanian dan peternakan yang dihasilkan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas dan mutu yang baik mampu bersaing dengan produk-produk pertanian dan peternakan dari luar sehingga dapat diterima oleh pasar.

Untuk dapat mewujudkan visi dengan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang di dalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi merupakan pernyataan yang digunakan untuk menetapkan tujuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan visi tersebut, menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan
2. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan peternakan
3. Meningkatkan sistem informasi pertanian dan peternakan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pertanian dan peternakan

Tujuan merupakan penjabaran yang perlu dilakukan untuk mencapai misi, sedangkan sasaran adalah adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan kata lain tujuan dapat diartikan sebagai suatu karakteristik yang ideal dan mengandung nilai-nilai hukum dan hasrat yang kuat untuk menjadi lebih. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi dalam proses perencanaan sebagai pemerintahan kabupaten.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan sebagaimana diuraikan pada berikut ini.

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan	1) Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 2) Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman 3) Meningkatnya produksi dan

	produktivitas peternakan
	4) Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
	5) Meningkatnya mutu produksi, pengolahan hasil dan pemasaran pertanian dan peternakan
	6) Meningkatnya inovasi teknologi pertanian dan peternakan tepat guna
2. Meningkatnya luas kawasan areal tanaman pangan dan hortikultura	1) Meningkatnya luas areal sawah hortikultura dan optimasi lahan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan	1) Meningkatnya ketersediaan alat dan mesin pertanian dan peternakan
	2) Meningkatnya jaringan irigasi dan jalan usaha tani
	3) Meningkatnya lahan pertanian yang bersertifikat
4. Tersedianya data dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan tepat waktu	1) Meningkatnya ketersediaan data dan pelayanan data dan informasi pertanian



- 
- |  |  |
|--|--|
| 5. Meningkatkan kinerja aparatur pertanian | 1) Meningkatnya kemampuan dan kualitas aparatur<br>2) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor |
|--|--|
- 
- |  |   |
|--|---|
| 6. Terwujudnya petani/peternak yang berdaya saing dalam pengelolaan usaha tani | 1) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan petani/peternak<br>2) Meningkatnya dinamisasi kelembagaan kelompok tani |
|--|---|
- 

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, 2011

Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan (1) Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan, (2) Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, (3) Menciptakan kebijakan dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Kebijakan minimal yang harus dikembangkan adalah meliputi kebijakan (a) Kebijakan Publik, (b) Kebijakan Teknis, (c) Kebijakan Alokasi Sumber Daya

Organisasi (Sarana dan Prasarana), (d) Kebijakan Personalia, (e) Kebijakan Keuangan, dan (f) Kebijakan Pelayanan Masyarakat

Strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan paket teknologi pertanian dan peternakan
2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan pertanian
3. Penyediaan alat dan mesin pertanian dan peternakan
4. Pembangunan jaringan irigasi, embung dan jalan usaha tani
5. Melaksanakan sertifikasi lahan usaha tani
6. Pengembangan data dan informasi pertanian dan peternakan
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang bagi aparatur
8. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kantor
9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang bagi petani/peternak
10. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani.

Strategi yang ditetapkan selanjutnya dirumuskan dalam Kebijakan. Dengan kebijakan yang ditentukan diharapkan strategi yang dijalankan bisa

efektif untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Adapun kebijakan yang akan ditempuh adalah :

1. Melaksanakan intensifikasi usaha tani
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak
4. Meningkatkan perlindungan hewan terhadap penyakit menular strategis dan zoonosis
5. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan produksi hasil ternak
6. Meningkatkan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan
7. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani tentang inovasi teknologi tepat guna dan penyediaan sarana teknologi tepat guna
8. Sertifikasi lahan usaha pertanian
9. Melakukan cetak sawah, optimasi lahan dan pembukaan lahan hortikultura
10. Pengadaan alat dan mesin pertanian
11. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Embung dan Jalan Usaha Tani (JUT)
12. Melakukan pengumpulan, penyajian dan penyebaran data dan informasi

13. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti Diklat, magang atau bimbingan teknis
14. Penambahan jumlah sarana dan prasarana aparatur
15. Melakukan pemeliharaan barang inventaris dan asset secara berkala
16. Menyelenggarakan Diklat, bimbingan teknis, dan magang bagi petani/peternak
17. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan magang bagi kelompok tani

## **B. Pelaksanaan dan Hal-hal yang Mempengaruhi Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian**

### **1. Isi atau Content Kebijakan**

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya

infrastruktur pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan dalam bentuk belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan bencana di bidang pertanian. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 kebijakan bantuan sosial pertanian mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian

Tabel 4.4. Tujuan Bantuan Sosial Pertanian Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2008-2012.

2008	2009	2010	2011	2012
12/Permentan/OT.140/2/2008	4/Permentan/OT.140/1/2009	14/Permentan/OT.140/1/2010	66/Permentan/OT.140/12/2010	02/Permentan/OT.140/1/2012
Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian	Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian	Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian	Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian	-
Memberdayakan masyarakat pertanian	Memberdayakan masyarakat pertanian	Memberdayakan masyarakat pertanian	Memberdayakan masyarakat pertanian	Pemberdayaan sosial
-	-	-	-	Perlindungan sosial
-	-	-	-	Penanggulangan

				kemiskinan
-	-	-	-	Penanggulan bencana

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah.

pelaku usaha serta memberdayakan masyarakat pertanian. Namun sejak tahun 2012 tujuan bantuan sosial pertanian berubah menjadi empat poin hal ini terjadi adanya penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 dimana tujuan bantuan sosial lebih difokuskan pada penanganan resiko sosial.

Tujuan kebijakan bantuan sosial pertanian diuraikan dan jelaskan lebih lanjut untuk melihat turunan dalam bentuk program dan kegiatan. Ada dua puluh tiga kegiatan yang dikelompokkan dalam lima program. Kegiatan dan program tersebut disusun dengan fokus penanganan pada resiko sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun masing-masing program dan kegiatan tersebut adalah :

**a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Keempatannya meliputi:**

- 1) Pengelolaan produksi Tanaman Serealia

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area yaitu bantuan kawasan budidaya padi dan bantuan kawasan jagung;

#### 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area yaitu bantuan kawasan budidaya kedelai; pengembangan kedelai model; bantuan pengembangan ubikayu; bantuan pengembangan ubijalar; bantuan pengembangan pangan alternatif dan bantuan perluasan budidaya kedelai;

#### 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk meningkatnya penggunaan benih unggul sehingga dapat mendorong peningkatan produksi melalui bantuan untuk pemberdayaan penangkar;

#### 4) Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen (susut) melalui bantuan sarana pascapanen padi; bantuan sarana pascapanen jagung; bantuan sarana pascapanen kedelai; bantuan sarana pascapanen ubi kayu dan bantuan sarana pascapanen ubijalar;

#### 5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan melalui bantuan untuk Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), dukungan kawasan perbatasan/ daerah tertinggal serta bantuan bencana alam.

**b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk**

**Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Kegiatannya meliputi:**

1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Kegiatan ini untuk memfasilitasi bantuan pengembangan hortikultura kepada LM3 seperti belanja bantuan sosial pengembangan hortikultura melalui LM3.

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Kegiatan ini untuk pengembangan kawasan tanaman buah seperti fasilitasi pengembangan salak dalam mendukung pasca erupsi bencana merapi.

**c. Program Swasembada Daging Sapi/ Kerbau dan Peningkatan**

**Penyediaan Protein Hewani yang ASUH Kegiatannya meliputi**

1. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (prioritas nasional dan bidang).



Kegiatan ini untuk pengembangan budidaya sapi potong berupa pengembangan budidaya sapi potong; dan

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (prioritas bidang)

Kegiatan ini untuk penguatan sapi/kerbau betina bunting berupa penguatan sapi/kerbau betina bunting.

**d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana**

**Pertanian, kegiatannya meliputi:**

1. Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Mandiri

Kegiatan ini untuk meningkatkan kepemilikan alat dan mesin pertanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani, berkembangnya pemanfaatan alsintan melalui UPJA akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi sistem dan usaha tani serta pemberdayaan kelembagaan UPJA berupa belanja bantuan sosial pengembangan UPJA mandiri;

2. Pengembangan Sumber Air

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di daerah non irigasi sebagai sumber utama pengairan untuk menambah areal tanam, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Sumber Air;

### 3. Pengembangan Embung

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air pada saat terjadi kekurangan air (sebagai suplesi) pada daerah irigasi/ non irigasi sehingga dapat menambah IP, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Embung;

### 4. Pemberdayaan Kelembagaan

Kegiatan ini untuk meningkatkan penerapan pola partisipasi petani dalam pengembangan irigasi di tingkat usaha tani, mengembangkan dan meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggungjawab dari petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi yang lebih efisiensi, efektif dan berkelanjutan, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pemberdayaan Kelembagaan;

### 5. Perluasan Areal Sawah

Kegiatan ini untuk bertambahnya luas baku lahan sawah, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Sawah;

### 6. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik(UPPO)

Kegiatan ini untuk pemberian langsung ke kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan dipergunakan untuk;

- a. Pembangunan Rumah Kompos;
- b. Pembangunan Bak Fermentasi;
- c. Pengadaan alat pengolah pupuk organik;
- d. Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga);

- e. Pembangunan kandang ternak; dan
- f. Pengadaan 10 (sepuluh) ekor sapi/kerbau.

7. Pengembangan Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO)

- a. Pembangunan rumah kompos;
- b. Pembangunan bak fermentasi;
- c. Pengadaan alat pengolah pupuk organik; dan
- d. Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga).

8. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Kegiatan ini untuk pemberian bantuan langsung ke gabungan kelompok tani (gapoktan) dan dibelanjakan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang ditetapkan oleh gapoktan penerima, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial PUAP;

9. Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja jaringan fungsi layanan irigasi dan untuk dapat mendukung ketersediaan air pada per tanaman padi, meningkatkan areal tanam melalui penambahan IP dan penambahan baku lahan, meningkatkan produktivitas, membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru;

#### 10. Pengembangan SRI (System Rice Intensification)

Kegiatan ini untuk terlaksananya budidaya SRI melalui Belanja bantuan sosial Pengembangan SRI;

#### 11. Pengembangan Optimasi Lahan

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar dan IP rendah pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui Belanja bantuan sosial Pengembangan Optimasi Lahan;

#### 12. Pengembangan Jalan Pertanian

Kegiatan ini untuk pembangunan baru/peningkatan kapasitas, rehabilitasi jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Jalan Pertanian;

#### 13. Perluasan Areal Hortikultura

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun buah unggulan nasional dan daerah melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Hortikultura;

#### 14. Perluasan Areal Peternakan

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun Hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Peternakan.

**e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Kementerian Pertanian**

Kegiatan ini untuk Fasilitasi Kebijakan Pimpinan di Daerah, Keterkaitan antara Program, Kegiatan dan Output kegiatan dengan tujuan penggunaan, dan bentuk Belanja Bantuan.

Pengukuran dilakukan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pencapaian tujuan. Pengukuran indikator dilakukan terhadap kegiatan subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan, subsektor prasarana dan sarana serta subsektor pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.

**a. Subsektor Tanaman Pangan**

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian dan ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia, merupakan salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi bangsa Indonesia. Dibalik nilai (*value*) yang penting dan strategis tersebut, subsektor tanaman pangan juga merupakan salah satu pusat kemiskinan di Indonesia.

Kegiatan SL PTT dan Pengembangan Perbenihan merupakan salah satu kegiatan yang tetap dilaksanakan (hampir) setiap tahun. Berdasarkan penilaian Kementerian Pertanian kegiatan tersebut yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya. Subsektor tanaman pangan Kementerian Pertanian cukup konsekuen dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan

Tabel 4.5. Indikator Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Kegiatan Utama	2008	2009	2010	2011	2012
Pengembangan Pupuk	100 Ha	3 klp	1 paket	-	-
Pengembangan Perbenihan	25 Ha	3500 ha	-	1 paket	1 paket
Mekanisasi	-	10 unit HT	1 paket	-	-
SL PTT	100 KT	140 LL	90 LL	2500 ha padi	2500 ha padi
Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

kemandirian pelaku usaha pertanian, hal ini terlihat dari porsi keluaran yang ada pada periode 2008-2012 cukup besar untuk kegiatan SL PTT yang bertujuan (Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura, 2012) meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dengan

pertimbangan teknis yang matang dan mampu mengaplikasikan teknis budidaya secara baik dan benar

### **b. Subsektor Hortikultura**

Komoditas hortikultura merupakan salah satu komoditas potensial sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Usaha agribisnis hortikultura, selama ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, terkait penyerapan tenaga kerja, perdagangan, sumber pendapatan masyarakat dan penghasil makanan bergizi.

Pembangunan Subsektor Hortikultura diarahkan untuk membentuk kawasan-kawasan produksi hortikultura, menerapkan Cara Bertani yang Baik (CBB) dan menata mata rantai pasokan produk. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat terurainya masalah pada tingkat petani dan kawasan sehingga dapat meningkatkan kinerja Subsektor Hortikultura.

Selama empat tahun dalam periode 2008-2012 indikator sub sektor Hortikultura adalah pengembangan kawasan seluas 286 ha yang merupakan konsekuensi logis untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan memberdayakan masyarakat pertanian.

Tabel 4.6. Indikator Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Kegiatan	2008	2009	2010	2011	2012
----------	------	------	------	------	------

Utama					
Pengembangan Kawasan	70 ha	16 ha	80 ha	-	120 ha
SL GAP	-	-	1 paket	-	16 paket
Pemberdayaan Kelembagaan	-	-	-	-	1 paket
Pengembangan Kebun Benih	-	-	50 pohon induk	-	-
Dukungan Administrasi	-	-	-	-	1 paket

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

### c. Subsektor Peternakan

Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan. Ketiadaan Kegiatan Dukungan administrasi tentunya akan menyulitkan pelaksana kegiatan dapat optimal melaksanakan kegiatan Subsektor Peternakan untuk mencapai tujuan.

Tabel 4.7. Indikator Kegiatan Subsektor Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Kegiatan Utama	2008	2009	2010	2011	2012



Agribisnis	18 ekor sapi	1 paket	-	-	-
Ketahanan Pangan	1000 ekor itik	-	-	-	-
Peningkatan Produksi	82 ekor sapi	1 paket	-	-	-
Dukungan Administrasi	-	1 paket	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Subsektor Peternakan cukup selaras dalam merumuskan keluaran, sehingga tujuan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian diharapkan dapat tercapai.

#### **d. Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian**

Subsektor Prasarana dan sarana Pertanian mempunyai tanggung jawab untuk dapat menyediakan semua prasarana dan sarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. Masukan/Input Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian khususnya untuk kegiatan Dukungan Administrasi sangat terlihat minim dibandingkan dengan besarnya nilai kegiatan.

Tabel 4.8. Indikator Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Kegiatan Utama	2008	2009	2010	2011	2012
----------------	------	------	------	------	------

Pengelolaan Air	3 keg	6 keg	4 keg	5 paket	10 paket
Pengelolaan Lahan	2 keg	3 keg	1 keg	-	500 persil
Perluasan Areal	70 ha	3 keg	1 keg	2 paket	2 paket
Mekanisasi	-	-	-	2 paket	-
Pupuk dan Pestisida	-	-	-	1 paket	1 paket
Fasilitas Pembiayaan	-	-	-	-	1 paket
Dukungan Administrasi	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan output yang lebih besar pada kegiatan pengelolaan air, pengelolaan lahan dan perluasan areal yang merupakan fokus pada Subsektor Prasarana dan Sarana.

#### e. Subsektor Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian

Sama seperti Subsektor Peternakan, anggaran kegiatan Subsektor PPHP di anggarkan pada tingkat Propinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan hanya memfasilitasi calon penerima bantuan dan tidak terlibat aktif dalam administrasi kegiatan. Walaupun dana yang diberikan Subsektor PPHP tidak terlalu besar tetapi inputnya cukup untuk memfasilitasi SDM, peralatan, material, monitoring dan lain-lain dari kegiatan Subsektor ini untuk dapat mencapai tujuan.

Tabel 4.9. Indikator Kegiatan Subsektor PPHP di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

Kegiatan Utama	2008	2009	2010	2011	2012
Pengembangan Agribisnis	-	1 paket	-	-	-
Peningkatan Ketahanan Pangan	-	1 paket	-	-	-
Dukungan Administrasi	-	1 paket	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Barang dan jasa yang merupakan output dari kegiatan Subsektor PPHP merupakan cerminan pelaksanaan kegiatan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan.

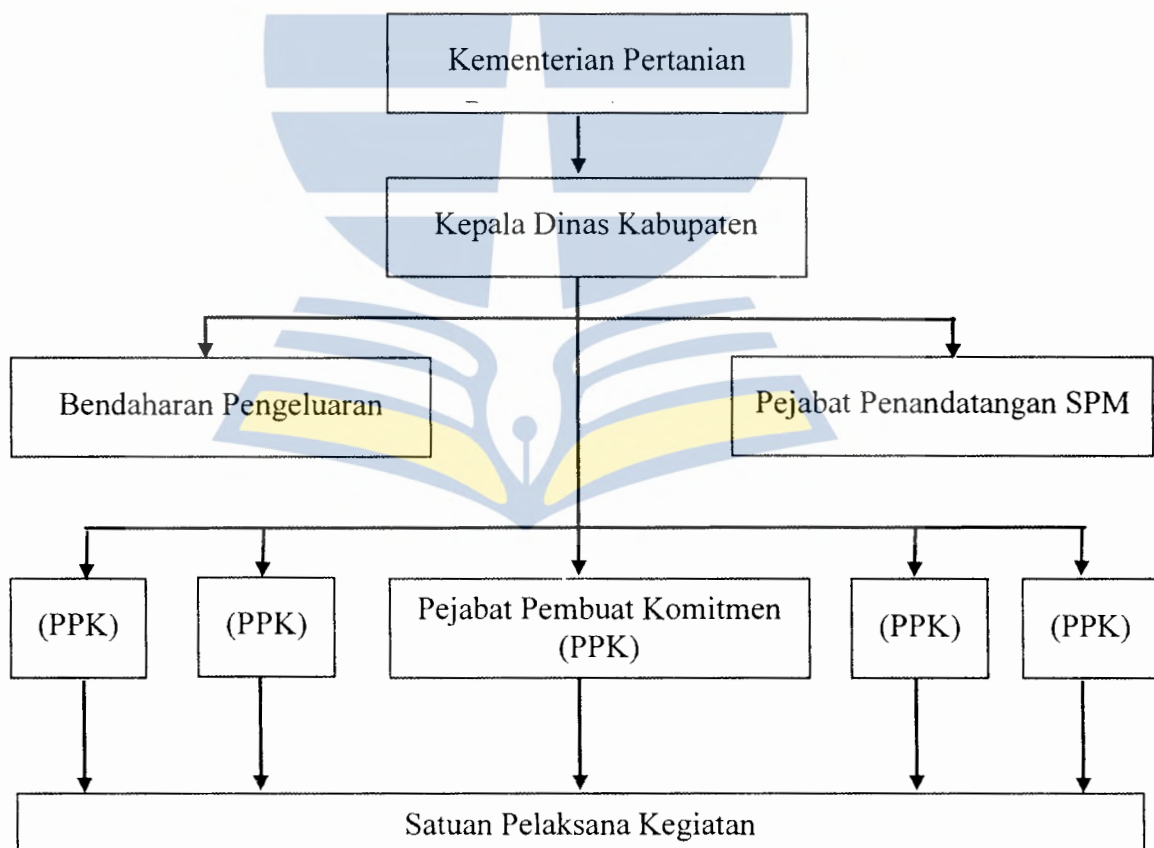
## 2. Pelaksana dan Kelompok Sasaran

### a. Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan tergantung pada pelaksana kebijakan (implementator). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers). Hal tersebut didukung oleh tingkat pendidikan formal personil yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, 10 orang SMA, 1 orang D-3, 29 orang S1 dan 1 orang S2. Dari data yang disampaikan bahwa ada

70,73% personil yang ada berpendidikan sarjana sehingga cukup mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan kebijakan bantuan sosial pertanian.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kementerian Pertanian (2012), untuk mendukung pematapan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi dan peningkatan jaringan kerja melalui hubungan hierarki, koordinasi dan teknis fungsional, dengan penjelasan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Organisasi Pelaksana Bantuan Sosial Pertanian

#### - Hubungan Hierarki

Kementerian Pertanian mempunyai hubungan hierarki dengan propinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian di daerah sesuai dengan azas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk itu, pemanfaatan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh satuan kerja yang menerima pelimpahan atau penugasan dikelola, dipertanggung jawabkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hubungan hierarki tersebut terwujud dalam sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan.

#### - Hubungan Koordinasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja dibutuhkan sinergi perencanaan program dengan pembiayaan. Sebagai wujud pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan melalui hubungan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan UPT pusat dengan dinas provinsi dan kabupaten yang menangani tanaman pangan dan UPTD (BBI, BPSBTPH dan BPTPH). Koordinasi dilakukan terutama untuk mempertemukan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan tujuan dan sasaran pembangunan masing-masing daerah, sehingga didapat kesepakatan tentang tujuan dan sasaran

pembangunan yang ingin dicapai bersama, khususnya pembangunan yang dibiayai dari APBN. Dengan koordinasi ini, diharapkan masing-masing daerah juga dapat berkontribusi melalui APBD yang dimiliki.

Koordinasi juga diperlukan antara UPT Pusat dengan UPT Daerah, terutama untuk keseragaman peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam aspek penyelesaian masalah (arbitrase) bila terjadi suatu perselisihan, khususnya perselisihan antar daerah.

#### - Hubungan Teknis Fungsional

Hubungan teknis fungsional dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang berazaskan dekonsentrasi/tugas pembantuan bertujuan untuk dapat memenuhi standar teknis di bidang tanaman pangan. Dengan demikian produk/jasa yang dihasilkan dibidang tanaman pangan dapat diproduksi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Wujud dari hubungan teknis fungsional tersebut, dilaksanakan melalui pembinaan teknis kegiatan di lapangan seperti teknis penyiapan sarana produksi, teknis perbenihan/perbibitan, teknis perlindungan

tanaman, teknis usahatani, panen dan pasca panen, dan teknis pelatihan bagi aparat pertanian dan pelaku usahatani.

#### **b. Kelompok Sasaran**

Secara konseptual (Pedoman Umum Bantuan Sosial Kementerian Pertanian, 2012) kebijakan bantuan sosial pertanian di lingkup Kementerian Pertanian meliputi pemberdayaan kelompok/gabungan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok/gabungan kelompok dalam mengelola dan mengembangkan usaha/ kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok/gabungan kelompok yang dimaksud, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok dan pelaku agribisnis lain. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok.

Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat Kabupaten dengan menciptakan iklim kondusif sehingga masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya sendiri, serta mampu mengembangkan dan memperkuat dirinya

sendiri untuk menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat/petani. Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok/ gabungan kelompok bersama anggotanya mampu mengembangkan usaha/kegiatan secara musyawarah, transparan, dan akuntabel untuk dapat mandiri dalam mengelola kelembagaan, manajemen, dan usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota kelompok/gabungan kelompok dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat, manajemen, dan usaha-usaha produktif di bidang pertanian. Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok/ gabungan kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hasil seleksi tim teknis untuk menentukan penerima bantuan sosial di Kabupaten Nunukan tahun 2008-2012 adalah sebanyak 180 kelompok/ gabungan kelompok penerima.

### **3. Lingkungan**

Pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya akan memberi manfaat



yang maksimal bagi masyarakat, dan dengan demikian masyarakat akan mampu memeliharanya. Pembangunan nasional yang dinilai berhasil pada hakikatnya adalah yang dilakukan oleh dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan masyarakat dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Menurut Montgomery (1988) suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila dilaksanakan oleh dan hasilnya dirasakan secara meluas dan merata.

Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya atau dengan kata lain memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“peoplecentered, participatory, empowering and sustainable”* (Kirdar, 2010).

Secara praktis upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas petani sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan petani dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, petani dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Petani miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya (Kartasasmita, 2013). Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu responden petani :

“Karena (bantuan sosial) yang kami terima dalam bentuk uang yang kemudian kami belanjakan sendiri sesuai bimbingan dan petunjuk petugas bansos. Sehingga apa yang kami perlukan berapa jumlah dan mau belanja dimana dapat kami tentukan sendiri.”

Sedangkan dari sisi lingkungan geografis, pelaksanaan bantuan sosial pertanian sangat dipengaruhi oleh jarak, jangkauan dan kemudahan akses ke lokasi bantuan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah kelompok penerima bantuan untuk lokasi/kecamatan yang jauh (seperti Kecamatan Krayan dan

Krayan Selatan) di bandingkan dengan lokasi yang berada di kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten (Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik).

### C. Manfaat dan Keberhasilan Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian

Manfaat dan keberhasilan kebijakan bantuan sosial dapat dilihat dengan mengukur sejauh mana pelaksanaan atau realisasi dari kegiatan dalam pencapaian tujuan kebijakan program. Pengukuran pencapaian tujuan tersebut diuraikan dalam 5 (lima) indikator yaitu : efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

#### 1. Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

##### 1) Subsektor Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian dan ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia, merupakan salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, dan sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi bangsa Indonesia. Dibalik nilai (*value*) yang penting dan strategis tersebut, subsektor tanaman pangan juga merupakan salah satu

pusat kemiskinan di Indonesia. Subsektor tanaman pangan Kementerian Pertanian cukup konsekuen dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian, hal ini terlihat dari porsi keluaran yang ada pada periode 2008-2012 cukup besar untuk kegiatan SL PTT yang bertujuan (Pedoman umum pelaksanaan pengembangan hortikultura, 2012) meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dengan pertimbangan teknis yang matang dan mampu mengaplikasikan teknis budidaya secara baik dan benar.

Tabel 4.10. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008

Kegiatan Utama	2008			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
Pengembangan Pupuk	100 Ha	100 Ha	*	*
Pengembangan Perbenihan	25 Ha	25 Ha	*	*
SL PTT	2500 Ha	2322 Ha	Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Nunukan, Sebuku, Lumbis	
Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	-

\*) Realisasi berdasarkan buku laporan tahunan sub sektor tanaman pangan 2008.

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Kegiatan SL PTT dan Pengembangan Perbenihan merupakan salah satu kegiatan yang tetap dilaksanakan (hampir) setiap tahun. Berdasarkan penilaian Kementerian Pertanian kegiatan tersebut yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya. Subsektor Tanaman Pangan

merupakan salah satu dari lima subsektor yang aktif (setiap tahun) mempunyai kegiatan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program khususnya subsektor tanaman pangan pada tahun 2008 terlihat bahwa hampir semua kegiatan utama dapat terealisasi 100%, kecuali kegiatan SL PTT yang mencapai 92,88%.

Tabel 4.11. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2009

Kegiatan Utama	2009			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
Pengembangan Pupuk	3 unit	1 unit	Sejahtera	Mansapa Nunukan Selatan
		1 unit	Sipurenmu	Tj. Harapan Nunukan Selatan
		1 unit	Surya Abadi Sebatik	Ds. Pancang Sebatik
Pengembangan Perbenihan	3500 ha	Kecamatan Nunukan 292 ha, Nunukan Selatan 630,5 ha, Sebatik 861 ha, Sebatik Barat 717 ha, Sembakung 382 ha, Sebuku 121,5 ha		
Mekanisasi	10 unit HT	5 unit	Maspul Jaya	Mansapa Nunukan Selatan
		5 unit	Sumber Hidup	Ds. Pancang Sebatik

SL PTT	140 LL	Kecamatan Nunukan 14, Nunukan Selatan 18, Sebatik 33, Sebatk Barat 25, Sembakung 23, Sebuku 6		
Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2009 semua (lima) kegiatan utama subsektor tanaman pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor tanaman pangan di kabupaten Nunukan tahun 2009 adalah mencapai 94,16%.

Pada tahun 2010 ada tiga kegiatan utama subsektor tanaman pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor tanaman pangan di kabupaten Nunukan tahun 2010 adalah mencapai 62,96%.

Tabel 4.12. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2010

Kegiatan Utama	2010			
	Volume		KT	Lokasi
Pengembangan Pupuk	1 paket	1 Unit APPO	Gapoktan Cahaya Seimengkadu	Tj. Harapan Nunukan Selatan
Pengembangan Perbenihan	-	-	-	-
Mekanisasi	1 paket	-	Jaya Mandiri	Ds. Binusan Nunukan

SL PTT	90 LL	90 LL non hibrida	12 KT Nunukan, 14 KT Nunukan Selatan, 33 KT Sebatik, 22 KT Sebatik Barat, 13 KT Sembakung, 5 KT Sebuku.	
Dukungan Administrasi	-	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2011 ada tiga kegiatan utama subsektor tanaman pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor tanaman pangan di kabupaten Nunukan tahun 2011 adalah mencapai 90,55%.

Tabel 4.13. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2011

Kegiatan Utama	2011			
	Volume		KT	Lokasi
Pengembangan Pupuk	-	-	-	-
Pengembangan Perbenihan	2500 ha padi	1891 ha	Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebuku, Lumbis, Sembakung	
Mekanisasi	-	-	-	-
SL PTT	100 LL	Kecamatan Nunukan 7, Nunukan Selatan 11, Sebatik 20, Sebatk Barat 15, Sembakung 26, Sebuku 4, Lumbis 13		

Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	-
-----------------------	---------	---------	---	---

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2012 ada tiga kegiatan utama subsektor tanaman pangan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor tanaman pangan di kabupaten Nunukan tahun 2012 adalah mencapai 96,07%.

Tabel 4.14. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2012

Kegiatan Utama	2012			
	Volume		KT	Lokasi
Pengembangan Pupuk	-	-	-	-
Pengembangan Perbenihan	2500 ha padi	2305,6 ha	Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebuku, Lumbis, Sembakung	
Mekanisasi	-	-	-	-
SL PTT	100 LL	Kecamatan Nunukan 10, Nunukan Selatan 8, Sebatik 20, Sebatk Barat 15, Sembakung 26, Sebuku 4, Lumbis 13		
Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah



## 2) Subsektor Hortikultura

Komoditas hortikultura merupakan salah satu komoditas potensial sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Usaha agribisnis hortikultura, selama ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, terkait penyerapan tenaga kerja, perdagangan, sumber pendapatan masyarakat dan penghasil makanan bergizi. Pembangunan Subsektor Hortikultura diarahkan untuk membentuk kawasan-kawasan produksi hortikultura, menerapkan Cara Bertani yang Baik (CBB) dan menata mata rantai pasokan produk. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat terurainya masalah pada tingkat petani dan kawasan sehingga dapat meningkatkan kinerja Subsektor Hortikultura. Pada tahun 2009 ada dua kegiatan utama subsektor hortikultura dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 2009 adalah mencapai 100%.

Tabel 4.15. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2009

Kegiatan Utama	2009			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
Pengembangan Kawasan	16 ha	8 ha durian, 2 ha jeruk keprok	Setia Kawan II	Tj. Harapan, Nunukan Selatan

		5 ha durian, 1 ha jeruk keprok	KT. Limau	Nunukan Selatan, Nunukan Selatan
SL GAP	-	-	-	-
Pemberdayaan Kelembagaan	-	-	-	-
Pengembangan Kebun Benih	1 unit	1 unit penangkar benih durian dan jeruk keprok	Tunas Reski	Mansapa Nunukan Selatan
Dukungan Administrasi	-	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2010 ada dua kegiatan utama subsektor hortikultura dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 2010 adalah mencapai 100%.

Tabel 4.16. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2010

Kegiatan Utama	2010			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
Pengembangan Kawasan	20 ha	20 ha	Hidup Bersama	Mansapa Nunukan Selatan

SL GAP	40 peserta	45 peserta	8 KT, 7 PPL, 30 penduduk	Nunukan, Nunukan selatan, Sebatik Barat
Pemberdayaan Kelembagaan	-	-	-	-
Pengembangan Kebun Benih	50 pohon induk	50 pohon induk	Abadi Usaha	Nunukan Selatan, Nunukan Selatan
Dukungan Administrasi	-	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2012 ada dua kegiatan utama subsektor hortikultura dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 2012 adalah mencapai 100%.

Tabel 4.17. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Hortikultura di Kabupaten Nunukan Tahun 2012

Kegiatan Utama	2012			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
Pengembangan Kawasan	120 ha	25 ha	Mekar Jaya	Selisun Nunukan Selatan
		20 ha	Karya Mandiri	Pagaluyon Sembakung
		25 ha	Gapoktan Lestari	Ds. Saduman Sembakung
		15 ha	Netral Abadi	Ds. Sei. Manurung Sebatik
		25 ha	Hidup	Selisun

			Bersama II	Nunukan Selatan
		10 ha	Batang Kara	Binusa Nunukan
SL GAP	2 paket	1 paket SL GAP Jeruk	Netral Abadi	Ds. Sei Manurung Sebatik
			Sentosa	Ds. Balansiku Sebatik
			Tunas Harapan	Ds. Bambang Sebatik Barat
			Karya Mandiri	Ds. Paguluyon Sembakung
			Gapoktan Lestari	Ds. Saduman Sembakung
			Mekar Jaya	Selisun Nunukan Selatan

Lanjutan Tabel 4.17.

Kegiatan Utama	2012			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
			Hidup Bersama	Mansapa Nunukan Selatan
			Rezky	Mansapa Nunukan Selatan
			Batang Kara	Binusan Nunukan
		1 Paket SL GAP Durian	Hijau Lestari	Tj. Harapan Nunukan Selatan

			Fajar	Tj. Harapan Nunukan Selatan
			Jaya Sailong	Ds. Setabu Sebatik Barat
			Sahabat	Ds. Liang Bunyu Sebatik Barat
			Sinar Jaya	Ds. Sei Pancang Sebatik Utara
			Netral	Ds. Sei Limau Sebatik Tengah
Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

### 3) Subsektor Peternakan

Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. **Dinamika lingkungan dalam negeri** berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan. Subsektor Peternakan cukup selaras dalam merumuskan keluaran, sehingga tujuan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian

Tabel 4.18. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor  
Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008

Kegiatan Utama	2008			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
Agribisnis	1 paket	18 ekor sapi	Samaenre	Seimenggar is Nunukan
Ketahanan Pangan	1000 ekor itik	500 ekor itik	Dharma Bakti	Nunukan Selatan Nunukan Selatan
		500 ekor itik	Baldatun Thoyyibah	Selisun Nunukan Selatan
Peningkatan Produksi	1 paket	82 ekor sapi	Kampung Solo Naju	Binusan Nunukan
Dukungan Administrasi	-	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

diharapkan dapat tercapai. Pada tahun 2008 ada tiga kegiatan utama subsektor peternakan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 2008 adalah mencapai 100%.

Pada tahun 2009 ada tiga kegiatan utama subsektor peternakan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor hortikultura di kabupaten Nunukan tahun 2009 adalah mencapai 100%.

Tabel 4.19. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2009

Kegiatan Utama	2009			
	Rencana	Realisasi	KT	Lokasi
Agribisnis	1 paket	9 ekor	Serumpun	Nunukan
Ketahanan Pangan	-	-	-	-
Peningkatan Produksi	1 paket	30 ekor sapi	Sinar Apala	Tj. Harapan Nunukan Selatan
Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

#### 4) Subsektor Prasarana dan Sarana

Subsektor Prasarana dan sarana Pertanian mempunyai tanggung jawab untuk dapat menyediakan semua prasarana dan sarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan output yang lebih besar pada kegiatan pengelolaan air, pengelolaan lahan dan perluasan areal yang merupakan fokus pada Subsektor Prasarana dan Sarana. Pada tahun 2008 ada enam kegiatan utama subsektor prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di kabupaten Nunukan tahun 2008 adalah mencapai 94,53%.

Tabel 4.20. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2008

Kegiatan Utama	2008			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
<b>Pengelolaan Air</b>	3 keg			
- Jaringan Irigasi	500 Ha	500 Ha	Gapoktan Bina Bersama	Ds. Binalawan Sebatik Barat
- Pengembangan Embung	2 unit	1 unit	Bina Salam	Ds. Liang Bunyu Sebatik Barat
		1 unit	Sepakat	Ds. Pancang Kec Sebatik
<b>Pengelolaan Lahan</b>	2 keg			
- Jalan Usaha Tani	2 km	2 km	Gapoktan Bina Bersama	Ds. Binalawan Sebatik Barat
- Optimasi lahan	30 Ha	15 Ha	Setia Kawan	Kel Nunukan Selatan Kec Nunukan Selatan
		15 Ha	Cahaya Seimengkadu	Kel Nunukan Selatan Kec Nunukan Selatan

Lanjutan Tabel 4.20.

Kegiatan Utama	2008			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
<b>Perluasan Areal</b>	150 ha	-	-	-
- Pembukaan lahan horti	70 Ha	50 Ha	Mekar Abadi	Ds. Tj Kr Sebatik



		20 Ha	Hijau Lestari	Ds. Tj Harapan Nunukan Selatan
- Perluasan areal peternakan	80 Ha	15 Ha	Sinoulun	Ds.. Binusan Nunukan
		5 Ha	Sumber Rezeki	Ds.. Binusan Nunukan
		7 Ha	Jaya Makmur	Mansapa Nunukan Selatan
		8 Ha	Sinar Harapan	Sebatik
		10 Ha	Sipurenmu	Nunukan
<b>Dukungan Administrasi</b>	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2009 ada enam kegiatan utama subsektor prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di kabupaten Nunukan tahun 2009 adalah mencapai 88,10%.

Tabel 4.21. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2009

Kegiatan Utama	2009			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
<b>Pengelolaan Air</b>	6 keg			

- Jaringan Irigasi	7 Unit	1 unit	Inbaya Intugos	Sebatik Barat
		1 unit	Mattirowali	Sebatik
		3 Unit	Irigasi Tanah Dangkal Tidak Dilaksanakan	
		2 Unit	Irigasi Kawasan Peternakan tidak dilaksanakan	
- Pengembangan Embung	6 unit	1 Unit	Sinar Harapan	Sebatik
		1 Unit	Karya Bersama	Sebatik Barat
		1 Unit	Sinar 2000	Sebatik
		1 Unit	Sinoulun	Binusan Nunukan
		1 Unit	Jaya Makmur	Mansapa Nunukan Selatan
		1 Unit	Sipurenmu	Nunukan
<b>Pengelolaan Lahan</b>	3 keg			
- Jalan Usaha Tani	4 km	2 km	Seiring Bersama	Sebatik
		2 km	Polewali	Tj. Cantik Nunukan
- Optimasi lahan	20 Ha	20 Ha	Sahabat	Sebatik Barat
<b>Perluasan Areal</b>	3 keg	-	-	-
- Cetak sawah	200 Ha	200 Ha	Gapoktan Cahaya Seimengkadu	Tj. Harapan Nunukan Selatan

Lanjutan Tabel 4.21.

Kegiatan Utama	2009			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
- Pembukaan lahan horti	50 Ha	25 Ha	Sahabat	Sebatik Barat

		25 Ha	Mekar Abadi	Sebatik
<b>Dukungan Administrasi</b>	1 Paket	1 Paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2010 ada empat kegiatan utama subsektor prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di kabupaten Nunukan tahun 2010 adalah mencapai 90,00%.

Tabel 4.22. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2010

Kegiatan Utama	2010			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
<b>Pengelolaan Air</b>	4 keg			
- Jaringan Irigasi	200 Ha	100 Ha	Mamminasae	Tj. Aru Sebatik
	-	100 Ha	Seribu Temunung	Atap Sembakung
	3 Unit	1 Unit	Tujuh Lima II	Selisun Nunukan Selatan
	-	-	Tunas Muda Jaya	Nunukan Selatan Nunukan Selatan

Lanjutan Tabel 4.22.

Kegiatan Utama	2010			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi

	-	-	Gapoktan Cahaya Seimengkadu	Tj. Harapan Nunukan Selatan
- Pemberdayaan P3A	-	-	-	-
- Pengembangan Embung	1 Unit	1 Unit	Tani Jaya	Tj. Harapan Nunukan Selatan
<b>Pengelolaan Lahan</b>	1 keg	-	-	-
- Optimasi lahan	30 Ha	30 Ha	Bulan Purnama	Sekapal Nunukan Utara Nunukan
<b>Perluasan Areal</b>	1 keg	-	-	-
- Pembukaan lahan horti	50 Ha	25 Ha	Jaya Indah	Sebatik Induk
		25 Ha	Harapan Jaya Sekapal	Nunukan Utara Nunukan
<b>Dukungan Administrasi</b>	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2011 ada sepuluh kegiatan utama subsektor prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di kabupaten Nunukan tahun 2011 adalah mencapai 98,44%.

Tabel 4.23. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2011

Kegiatan Utama	2011			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
<b>Pengelolaan Air</b>	5 paket			
- Jaringan Irigasi	400 Ha	60 Ha	Batik Falad B	Ds. Pa' Loo Lumbis
	-	14 Ha	Matirowali	Binusan Nunukan
	-	30 Ha	Makmur	Seberang Sebatik
	-	30 Ha	Sumber hidup	Seberang Sebatik
	-	24 Ha	Bisa Salam	Liang Bunyu Sebatik Barat
	-	31 Ha	Sinar 2000	Lapri Sebatik
	-	11 Ha	Putra Kembar	Tj Kr Sebatik
	-	167 Ha	Pandan Wangi	Atap Sembakung
	-	33 Ha	Gapoktan Intimung	Lubakan Sembakung
- Pemberdayaan P3A	1 paket	-	P3A Simasei	Sebatik Barat
- Pengembangan Embung	1 Unit	1 Unit	Bina Mahesa	Liang Bunyu Sebatik Barat

Lanjutan Tabel 4.23.

Kegiatan Utama	2011			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
- Pengembangan Irigasi Partisipatif	1 paket	1 paket	KTP3A Sebatik Barat	KTP3A Sebatik Barat
<b>Perluasan Areal</b>	2 paket	-		
- Cetak sawah	100 Ha	-	Gapoktan Cahaya Sungai Ular	Ds. Sekadayun Taka Nnk Utara
- Pembukaan lahan horti	50 Ha	-	25 Ha Kejar Usaha Tani	Kel. Mansapa Nunukan Selatan
	-	-	25 Ha Bulan Purnama	Ds. Sekadayun Taka Nnk Utara
<b>Mekanisasi</b>	2 paket	-	-	-
- Traktor R2	2 unit	2 unit	UPJA Indah	Nunukan Selatan
- Pengembangan UPJA pemula	5 unit	5 unit	*	*
<b>Pupuk dan Pestisida</b>	1 paket			
- Unit Pengolahan Pupuk Organik	1 unit	1 paket	Mattiro Bulu	Nunukan Selatan
<b>Dukungan Administrasi</b>	1 paket	1 paket	-	-

\*) Realisasi berdasarkan buku laporan tahunan subsektor prasarana dan sarana 2011

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada tahun 2012 ada sembilan kegiatan utama subsektor prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan.

Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di kabupaten Nunukan tahun 2012 adalah mencapai 80,94%.

Tabel 4.24. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana di Kabupaten Nunukan Tahun 2012

Kegiatan Utama	2012			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
<b>Pengelolaan Air</b>	10 paket	-	-	-
- Pengembangan sumber air	3 unit	1 unit	Bulan Purnama	Ds. Sekadayun Taka
	-	1 unit	Hidup Bersama	Mansapa Nunukan Selatan
	-	1 unit	Karya Abadi II	Setabu Sebatik Barat
- Jaringan Irigasi	700 Ha	32 Ha	Tenguyun	Ds. Liang Bunyu Sebatik Barat
	-	30 Ha	Sumber Hidup	Ds. Seberang Sebatik Utara
	-	25 Ha	Sinar Waru	Tj. Harapan Sebatik Timur
	-	25 Ha	Matirowali Bersatu	Tj. Harapan Sebatik Timur
	-	20 Ha	Seiring Bersama	Tj. Karang Sebatik

Lanjutan Tabel 4.24.

Kegiatan Utama	2012			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
	-	50 Ha	Bones	Bukit Aru Indah Sebatik Timur
	-	15 Ha	Maju Wijaya	Tj. Karang Sebatik
	-	300 Ha	Gapoktan Bina Bersama	Binalawan Sebatik Barat
	-	46 Ha	Sawito	Tj Harapan Nunukan Selatan
	-	30 Ha	Fajar	Nunukan Selatan Nunukan Selatan
	-	30 Ha	Tunas Bagu	Binusan Nunukan
	-	30 Ha	Suka Maju	Binusan Nunukan
	-	67 Ha	Mekar Sari	Atap Sembakung
- Pemberdayaan P3A	-	-	-	-
- Pengembangan Embung	5 unit	1 unit	Sinar Pancang	Ds. Seberang Sebatik Utara
	-	1 unit	Mandiri	Ds. Binusan Nunukan
	-	1 unit	Sinar Jaya	Ds. Pancang Sebatik Utara



Lanjutan Tabel 4.24.

Kegiatan Utama	2012			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
	-	1 unit	Mattiro Bullu	Nunukan Selatan Nunukan Selatan
	-	1 unit	Karya Abadi II	Bambangan Sebatik Barat
<b>Pengelolaan Lahan</b>	500 persil	-	-	-
- Pra dan pasca sertifikasi	500 persil	50%	Hanya prasertifikasi	
<b>Perluasan Areal</b>	2 paket	-	-	-
- Cetak sawah	100 Ha	100 Ha	Pelangi Nusantara	Ds.. Binusan Nunukan
- Pembukaan lahan horti	-	-	-	-
- Perluasan areal peternakan	20 Ha	20 Ha	Batu Fagan	Sembudud Krayan
<b>Pupuk dan Pestisida</b>	1 paket	-	-	-
- Unit Pengolahan Pupuk Organik	-	-	-	-
- Pendampingan	1 paket	-	-	-
<b>Fasilitas Pembiayaan</b>	1 paket 35,64%	-	-	-
- Fasilitasi PUAP	1 paket	Peralihan administrasi		
<b>Dukungan Administrasi</b>	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

## 5) Subsektor Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian

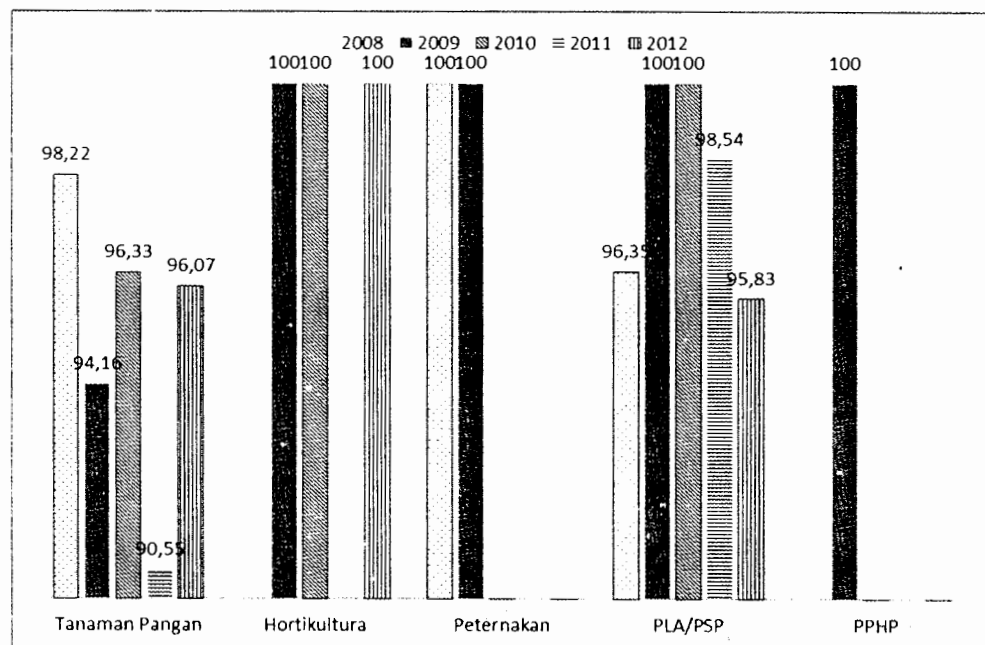
Pada tahun 2009 ada sepuluh kegiatan utama subsektor prasarana dan sarana dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Pencapaian realisasi kegiatan subsektor prasarana dan sarana di kabupaten Nunukan tahun 2012 adalah mencapai 100%.

Tabel 4.25. Pencapaian Realisasi Kegiatan Subsektor Peternakan di Kabupaten Nunukan Tahun 2008

Kegiatan Utama	2009			
	Volume	Vol/pek	KT	Lokasi
Pengembangan Agribisnis	1 paket	Box dryer, mesin jahit karung, karung, sabit bergerigi, timbangan, <i>power thresher</i>	Bina Bersama	Ds. Binalawan Sebatik Barat
Peningkatan Ketahanan Pangan	1 paket	Kendaraan Panen, gerobak, keranjang panen, terpal, parang, pisau, karung, sarung tangan, keranjang sortasi, baskom, gunting panen, alat ukur gula buah, timbangan	Surya Abadi Sebatik	Ds. Pancang Sebatik
			Sejahtera	Paguluyon Sembakung
			Cahaya Terang	Ds. Katul Sembakung
Dukungan Administrasi	1 paket	1 paket	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Pada Gambar 4.1. Dapat dilihat bahwa rata-rata efektivitas program bantuan sosial pertanian per subsektor dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah antara 95,07% sampai 100%. Berdasarkan pencapaian tersebut di atas dapat dilihat bahwa efektivitas kegiatan bantuan sosial



Gambar 4.2. Realisasi Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Per Subsektor tahun 2008-2012 (dalam %)  
Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

pertanian masuk dalam kategori memuaskan (MENPAN dan RB, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden PPK sebagai berikut :

“Kami (PPK) dalam melaksanakan program dan kegiatan bansos (bantuan sosial pertanian) selalu berusaha semaksimal mungkin, karena selain merupakan amanah dari pusat (Kementerian Pertanian) kegiatan ini juga untuk petani di daerah kita. Dan alhamdulillah kami dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan hasil yang cukup bagus.”

Dari sudut pandang petani juga merespon positif dalam hal menilai efektivitas kegiatan bantuan sosial pertanian, seperti yang disampaikan oleh salah satu responden petani sebagai berikut :

“Berbicara tentang efektivitas, kegiatan bansos yang pernah kami terima dan laksanakan dari dinas (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan) saya nilai cukup efektif. Karena yang kami terima dalam bentuk uang yang kemudian kami belanjakan sendiri sesuai bimbingan dan petunjuk petugas bansos. Sehingga apa yang kami perlukan berapa jumlah dan mau belanja dimana dapat kami tentukan sendiri.”

Jadi efektivitas yang cukup baik dalam kegiatan bantuan sosial pertanian ini selain dikelola oleh petugas/PPK yang telah memahami kegiatan juga karena bentuk bantuan itu sendiri yang mempunyai mekanisme atau prosedur pelaksanaan yang memperbesar peranan petani dan kelompok tani dalam mengelola baik itu perencanaan maupun pelaksanaannya untuk mencapai tujuan program. Seperti yang disampaikan Ndraha (2005) efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan, sehingga jika tujuannya tercapai maka efektivitasnya juga mempunyai nilai yang tinggi.

Tingginya nilai efektivitas merupakan buah hasil dari penerapan strategi pelaksanaan bantuan sosial pertanian, seperti yang disampaikan oleh Irianto (2004), bahwa rencana kegiatan atau program dalam suatu organisasi dianggap strategis apabila rencana itu dapat memperkecil energi masukan (seperti biaya, SDM, dan peralatan yang

dibutuhkan), tetapi sekaligus memperbesar keluaran, serta lebih produktif dalam mencapai sasaran. Esensi dari manajemen strategik terletak kepada bagaimana suatu organisasi merumuskan langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk mewujudkan cita-cita organisasi yang secara programatis dirumuskan dalam tujuan baik yang bersifat resmi (*official goals*) maupun operatif (*operative goals*)

## 2. Efisiensi

Efisiensi pemanfaatan anggaran adalah pengukuran untuk melihat sejauh mana anggaran yang disediakan oleh pemerintah memberikan manfaat maksimal kepada penerima bantuan. Efisiensi tersebut diamati dari pemanfaatan dana yang diberikan dalam bentuk pagu dibandingkan dengan realisasi penggunaan dana pada saat pelaksanaan kegiatan. Dari pagu anggaran yang diberikan kementerian pertanian terlihat bahwa anggaran subsektor prasarana dan sarana pertanian merupakan pagu terbesar yang diberikan Kementerian.

Tabel 4.26. Pencapaian Realisasi Keuangan Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012 (Jutaan rupiah)

No	Subsektor	2008		2009		2010		2011		2012	
		Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real
1	Tanaman Pangan	727	619	1.312	1.148	470	396	420	387	654	561
2	PLA/PSP	1.488	1.411	3.686	3.221	730	730	2.181	2.149	2.535	2.413
3	Peternakan	711	711	830	816	-	-	-	-	-	-
4	Hortikultura	-	-	220	200	305	294	-	-	2.110	2.101
5	PPHP	-	-	600	557	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Penggunaan dana akan memberikan pemahaman seberapa besar anggaran yang telah disediakan pemberi bantuan memberikan manfaat bagi penerima bantuan. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran persentase yang didapat pada Tabel 4.26, yang merupakan pencapaian realisasi keuangan kegiatan bantuan sosial pertanian dibandingkan dengan pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pertanian). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi biaya dalam kegiatan bantuan sosial pertanian berkisar antara 0,83% hingga 15,01%. Sedangkan efisiensi terhadap tujuan dapat terlihat bahwa dengan realisasi fisik yang memuaskan dapat dicapai dengan biaya yang tersedia, seperti yang disampaikan oleh Silalahi (2007) bahwa efisiensi adalah tingkat perbandingan atau rasio antara masukan

(input) dengan hasil (output) dimana input realisasi tidak lebih besar daripada input rencana.

Tabel 4.27. Pencapaian Realisasi Keuangan Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012

Subsektor	2008	2009	2010	2011	2012	Rerata
Tanaman Pangan	85,06%	87,48%	84,26%	82,34%	85,82%	84,99%
Hortikultura	-	90,88%	96,35%	-	99,56%	95,60%
Peternakan	100%	98,33%	-	-	-	99,17%
PLA/PSP	94,80%	87,39%	99,98%	98,53%	95,19%	95,18%
PPHP	-	92,87%	-	-	-	92,87%

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Dengan rata-rata nilai efisiensi di atas 10%, menunjukkan keberhasilan dalam menggunakan berbagai macam sumber, dan dapat menghasilkan keluaran yang maksimum. Sehingga sumber dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut maksimal digunakan (Irianto, 2004).

Hal tersebut dapat terjadi karena proses penentuan petani penerima bantuan sosial pertanian telah menjalani proses seleksi yang telah diatur sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis, ketidakmampuan petani atau kelompok tani melaksanakan kegiatan/program bantuan sosial pertanian akan disertai dengan tidak

disalurkannya dana bantuan tersebut. Dengan kata lain petani yang tidak siap melaksanakan kegiatan bantuan sosial pertanian akan terdeteksi pada awal kegiatan sehingga penggunaan dana bantuan akan lebih efisien.

Seperti yang dikatakan oleh responden salah seorang PPK sebagai berikut :

“Dalam menentukan petani atau kelompok tani penerima bansos (bantuan sosial pertanian), kami mengikuti prosedur yang telah ditetapkan (pedoman umum bantuan sosial pertanian dan petunjuk teknis). Petugas seleksi yang telah ditunjuk akan meninjau lokasi dan melakukan pertemuan dengan calon kelompok penerima untuk melihat kemampuan kelompok mengelola dana bansos.”

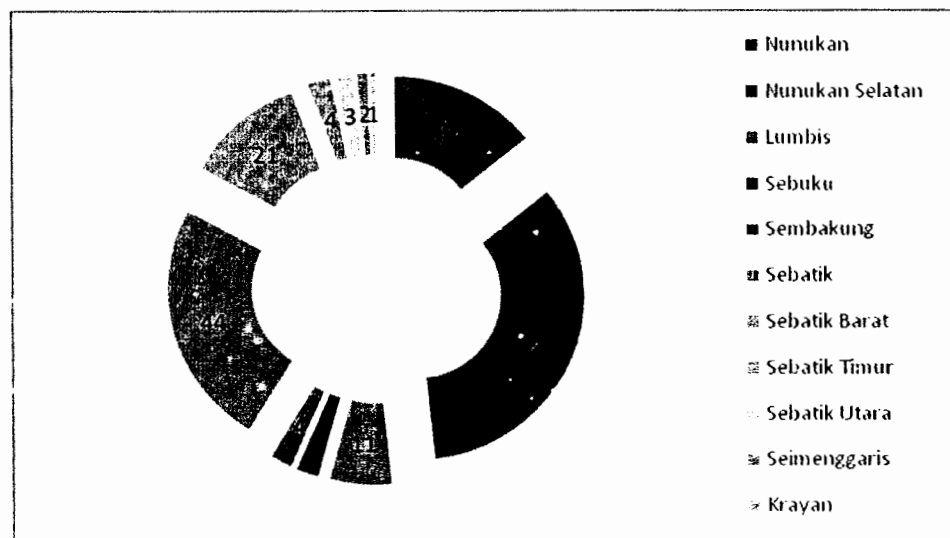
### **3. Pemerataan**

Jumlah kelompok tani dan petani di Kabupaten Nunukan adalah 315 kelompok dan 6.824 petani (Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur, 2012). Faktor geografis juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian. Dari data terlihat bahwa kecamatan yang mendapatkan bantuan terbanyak adalah Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik yang telah menyerap porsi sebanyak 58,24% dari seluruh penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit mendapatkan porsi bantuan kepada petani adalah Kecamatan Seimenggaris sebanyak



2 kali penyaluran (1,10%) untuk 2 kelompok tani dan Kecamatan Krayan yang masing-masing hanya 1 kali penyaluran (0,55%) untuk 1 Kelompok Tani.

Secara umum pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan manusia, untuk mencapai hal tersebut perlunya pemerataan kebijakan pembangunan. Pemerataan program bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan tahun 2008 – 2012 dinyatakan setuju bahwa bantuan tersebut merata



Gambar 4.3. Sebaran Penerima dan Lokasi Penyaluran Bantuan Sosial Pertanian Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2009  
Sumber : Data Penelitian, diolah

adalah 52% sedangkan yang menyatakan tidak setuju adalah 36%, sisanya yaitu 12% tidak menyatakan pendapat atau netral.

Tabel 4.28. Pernyataan Terhadap Indikator Pemerataan

<b>Pernyataan</b>	<b>Indikator Pemerataan</b>
Sangat Setuju	12%
Setuju	40%
Netral	12%
Tidak Setuju	24%
Sangat Tidak Setuju	12%

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Bantuan sosial pertanian yang telah tersalurkan masih belum bisa menyentuh seluruh petani dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Nunukan. Faktor geografis juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian. Dari data terlihat bahwa kecamatan yang mendapatkan bantuan terbanyak adalah Kecamatan Nunukan Selatan sebanyak 62 kali penyaluran (34,07%) untuk 17 Kelompok Tani dan Kecamatan Sebatik sebanyak 44 kali penyaluran (24,18%) untuk 16 Kelompok Tani. Kedua kecamatan ini telah menyerap porsi sebanyak 58,24% dari seluruh penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit mendapatkan porsi bantuan kepada petani adalah Kecamatan Seimenggaris sebanyak 2 kali penyaluran (1,10%) untuk 2 kelompok tani dan Kecamatan

Krayan yang masing-masing hanya 1 kali penyaluran (0,55%) untuk 1 Kelompok Tani.

Ketidakmerataan program bantuan sosial pertanian tersebut bukan alasan atau hambatan dalam pembangunan pertanian, program tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga suatu wilayah dapat berkembang dan membuat wilayah sekitarnya ikut berkembang atau dikenal dengan *Polarization Effect* dari Hirschman demikian disampaikan oleh Harmadi (2011).

Pemerataan yang kurang dalam pendistribusian bantuan sosial pertanian bisa terjadi karena beberapa alasan yang dapat dikemukakan, misalnya Kecamatan Krayan Selatan yang sangat kecil dalam akses bantuan bisa jadi karena kecamatan ini sangat terisolasi. Sampai saat ini hanya kecamatan ini yang belum terjangkau komunikasi seluler di Kabupaten Nunukan. Transportasi udara ke wilayah ini hanya menggunakan pesawat kecil berisi 6 tempat duduk dan lapangan terbang masih berupa lapangan rumput. Kesulitan ini diperkirakan menjadi penghambat terbesar penyaluran bantuan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden PPK sebagai berikut :

“Salah satu faktor pertimbangan terhadap kelompok yang menerima bansos adalah lokasi yang mudah dijangkau sehingga mudah untuk memantau perkembangan kegiatan dan daerah-daerah yang mempunyai akses ke lokasi juga lahan yang satu hamparan. Selain itu juga selain itu juga kelompok tani yang memahami prosedur dan tata cara bantuan sosial sesuai dengan pedoman umum.

#### 4. Responsivitas

Pengukuran daya tanggap kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat dinyatakan dengan responsivitas. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat birokrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dengan jumlah pegawai sebanyak 41 orang dan pegawai tidak tetap (non-PNS) sebanyak 26 orang. Sebagian besar pegawai adalah pegawai negeri sipil berpendidikan sarjana, berikut disampaikan tingkat pendidikan formalnya dari 41 orang PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, 10 orang SMA, 1 orang D-3, 29 orang S1 dan 1 orang S2. Sedangkan berdasarkan kuesioner yang disampaikan, responsivitas program bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan tahun 2008 – 2012 dinyatakan setuju bahwa bantuan tersebut telah responsif adalah 68% sedangkan yang menyatakan tidak setuju adalah 16%, sisanya yaitu 16% tidak menyatakan pendapat atau netral.

Tabel 4.29. Pernyataan Terhadap Indikator Responsivitas

<b>Pernyataan</b>	<b>Indikator Responsivitas</b>
Sangat Setuju	32%
Setuju	36%
Netral	16%
Tidak Setuju	16%
Sangat Tidak Setuju	0%

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Secara umum kebijakan bantuan sosial pertanian merupakan kegiatan yang cukup responsif karena sejalan dengan yang dikatakan oleh Dunn (2000) kebijakan bantuan sosial ini dapat memenuhi nilai-nilai tertentu dalam masyarakat atau kelompok tani. Juga selaras dengan salah satu tujuan bantuan sosial yang tertuang dalam permentan nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 yaitu :

“Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun 2012 bertujuan untuk memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha, ...”

Dari tujuan tersebut diformulasikan kegiatan yang dapat diterima masyarakat baik dari segi pelaksanaan maupun manfaatnya. Responsivitas juga dapat dilihat dari pemanfaatan bantuan oleh kelompok penerima pada saat setelah lewat tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, untuk kegiatan yang kurang dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani akan dibiarkan terlantar, tidak dirawat

dan dikelola dengan baik, sebaliknya untuk kegiatan yang sangat dibutuhkan petani. Hal yang sama menurut pendapat salah seorang responden PPK sebagai berikut :

“Responsivitas suatu kebijakan dapat dilihat dari sikap petani terhadap pemanfaatan hasil kegiatan setelah tahun pelaksanaan berlalu. Kegiatan bamsos ini rata-rata selalu dimanfaatkan, dirawat dan dikelola oleh kelompok petani penerima, karena mereka merasa kegiatan tersebut merupakan bantuan yang sangat mereka butuhkan.”

Dari data di atas diketahui bahwa PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan rata-rata berpendidikan SMA dan S1. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang relatif tinggi seperti itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan seharusnya dapat memberikan responsivitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan, terlihat aparat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam implementasi Program Bantuan Sosial Pertanian sudah maksimal melaksanakan tugas-tugasnya. Namun berdasarkan wawancara kepada salah satu responden petani, didapatkan jawaban agak sedikit berbeda, yaitu bahwa keluhan yang disampaikan kepada petugas, sifatnya hanya ditampung dijanjikan untuk diselesaikan. Hal tersebut konsekuensinya adanya kekecewaan petani terhadap aparat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.

Kurang baiknya sikap aparat dalam melayani petani memperlihatkan bahwa sistem pelayanan birokrasi masih menggunakan desain pelayanan yang tidak berdasar pada kepentingan petani, tetapi masih menetapkan dasar aturan formal secara kaku. Pelayanan birokrasi masih menerapkan manajemen pelayanan yang semata-mata hanya berdasar pada pendekatan formal, bukan mencoba untuk menerapkan pelayanan secara kontekstual berdasarkan perkembangan aspirasi petani. Pengaruh kultur dan struktur birokrasi yang masih paternalistik-sentralistik turut memberikan andil yang besar terhadap lemahnya responsivitas aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. (Dwiyanto, 2006)

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden PPK, dapat diketahui bahwa sikap dalam menghadapi keluhan masyarakat adalah fleksibel, yang mengandung arti setiap masyarakat dilayani dengan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dan kebutuhannya masing-masing. Penekanan terhadap sikap sabar dalam melayani merupakan salah satu alternatif untuk menampung aspirasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cukup baik. Sikap petugas dalam menghadapi keluhan petani sudah cenderung responsif. Petugas berusaha menyelesaikan keluhan pengguna jasa. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan sendiri di lapangan, maka akan

menyampaikan keluhan petani tersebut kepada, atasan atau pejabat yang lebih tinggi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.

Di samping itu menurut Anonim (2013) hal-hal yang mempengaruhi responsivitas adalah hukum, budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Responsivitas tersebut juga diperlukan dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan publik karena dengan adanya responsivitas pemerintah akan lebih mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto dalam Anonim, 2013).

## **5. Ketepatan**

Menurut Hendra (2013) ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. Sasaran dari program bantuan sosial



pertanian di Kabupaten Nunukan adalah petani, pada hasil penelitian penerima bantuan sosial pertanian semuanya merupakan petani sehingga ketepatan sasaran sudah tercapai. Seperti yang telah disampaikan pada indikator pemerataan, bantuan sosial pertanian mempunyai kendala pada ketepatan lokasi. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan terhadap indikator ketepatan pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29. Pernyataan Terhadap Indikator Ketepatan

<b>Pernyataan</b>	<b>Indikator Ketepatan</b>
Sangat Setuju	16%
Setuju	36%
Netral	36%
Tidak Setuju	8%
Sangat Tidak Setuju	4%

Sumber : Data Hasil Penelitian, diolah

Responden yang menyatakan setuju bahwa kebijakan tersebut tepat sebesar 52% sedangkan yang menyatakan tidak setuju adalah 12%, sisanya yaitu 36% tidak menyatakan pendapat atau netral. Ketepatan adalah indikator terakhir yang merupakan gabungan dari indikator efektivitas, efisiensi, kesamaan dan responsivitas. Nilai persentasi pernyataan tidak setuju yang mencapai 12% dan tidak menyampaikan pendapatnya 36%. Pernyataan ketepatan program bantuan sosial pertanian ini merupakan bentuk 'curahan hati' (curhat)

masyarakat terutama petani yang merasa kebutuhan mereka belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Padahal sebenarnya, pemerintah juga telah menawarkan solusi jika masalah-masalah seperti ini terjadi yaitu melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) atau musyawarah kelurahan (Muskel). Mekanisme ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan penetapan kelompok sasaran jika terjadi ketidaktepatan penerima manfaat di lapangan.

Indikator ketepatan untuk program bantuan sosial pertanian mempunyai nilai 52% dapat tercermin dari hasil produktivitas komoditas padi yang terus meningkat dari tahun 2008 hingga 2011 (Tabel 4.2.). Peningkatan sebesar 3,53% - 9,58% tersebut meningkat sejalan dengan banyaknya bantuan yang diberikan .

Hal-hal yang mempengaruhi indikator terakhir ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi oleh indikator sebelumnya, antara lain biaya, sumber daya manusia, peralatan, proses seleksi, kondisi geografis, hukum, budaya, politik, sosial ekonomi. Hal-hal tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan oleh Abdiprojo (2010), keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di

lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian ditentukan pula oleh tingkat informasi dari personel yang terlibat dalam pelaksanaan sehingga pelaksana dapat bekerja optimal. Selanjutnya ditentukan juga oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi.

## V SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan tahun 2008-2012 telah dilaksanakan 5 (lima) program yaitu 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan, 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura, 3) Program Swasembada Daging Sapi/ Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Protein Hewani yang ASUH, 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kementerian Pertanian dan 16 (enam belas) kegiatan.

Manfaat dan keberhasilan bantuan sosial kebijakan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan tahun 2008-2012 yang terurai pada masing-masing indikator cukup banyak, kecuali indikator pemerataan belum terlihat adanya manfaat dan keberhasilan program bantuan sosial pertanian, sehingga diharapkan dengan berkembangnya daerah yang mendapat alokasi bantuan sosial dapat membuat wilayah sekitarnya ikut berkembang. Pada indikator efektivitas dengan realisasi kegiatan bantuan sosial pertanian antara 95,07% sampai 100% manfaat dan keberhasilan yang diperoleh adalah program tersebut dapat memperbesar peranan petani dalam mengelola bantuan, indikator efisiensi ditunjukkan dengan rata-rata nilai efisiensi 6,44%.

menunjukkan sumber dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut maksimal digunakan, indikator responsivitas dapat terlihat dengan 70,73% personil yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berpendidikan Strata-I cukup membearikan responsivitas yang baik terhadap kebijakan bantuan sosial pertanian sehingga bantuan yang telah diberikan tidak disia-siakan dan tetap dimanfaatkan oleh petani dan indikator ketepatan dapat terlihat dari adanya peningkatan produksi padi sebesar 3,53% - 9,58%.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial pertanian di Kabupaten Nunukan antara lain :

1. Peran aktif dan keterlibatan langsung petani dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian.
2. Proses seleksi sesuai dengan prosedur pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan yang ada.
3. Letak geografis daerah/kecamatan penerima bantuan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pertanian. Monitoring/pemantauan kemajuan pekerjaan semakin sulit dilakukan untuk daerah yang semakin jauh dari ibukota kabupaten.
4. Sumber daya manusia pengelola atau petugas pelaksanaan yang memahami kegiatan bantuan sosial pertanian.

## **B. Saran**

Mengacu pada hasil identifikasi manfaat dan keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial pertanian maka dapat disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Nunukan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber pelaksana atau petugas pengelola sangat diperlukan dalam melaksanakan program bantuan sosial sehingga proses seleksi lebih tepat sasaran, dapat menjadi motivator bagi kelompok penerima bantuan untuk dapat aktif, dan lebih dapat memahami esensi dari bantuan sosial pertanian.
2. Peningkatan prasarana dan sarana akses jalur transportasi dan distribusi ke daerah-daerah pedalaman sehingga pelaksanaan program dapat menjangkau daerah-daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiprojo. (2010). *Kebijakan Publik : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta : Satu (Neo Link)
- Ananto., Erwin E. (2008). *2008: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Diunduh dari <http://indonesia-pharmacommunity.blogspot.com/2008/02/2008-indeks-pembangunan-manusia.html>, tanggal 5 September 2012.
- Anonim. (2013). *Pendekatan Teori : Layanan Publik, Responsivitas Birokrasi Pendidikan*. Diunduh dari [http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4431/isimt3\\_3b.html](http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4431/isimt3_3b.html) tanggal 12 September 2013
- Badan Perencana Pembangunan Daerah (2012). *Nunukan Dalam Angka 2012*. Bappeda Kabupaten Nunukan.
- Dinas Pertanian Propinsi Kalimantan Timur. (2012). *Data Kecamatan dan Kelompok Tani 2012*. Diunduh dari [http://dispertan.kaltimprov.go.id/Data\\_Kecamatan\\_dan\\_Kelompok\\_Tani\\_2012](http://dispertan.kaltimprov.go.id/Data_Kecamatan_dan_Kelompok_Tani_2012) tanggal 12 September 2013
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. (2012). *Laporan Akhir Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan*. Nunukan : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. (2012). *Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan*. Nunukan : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. (2011). *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura*. Jakarta : Direktorat Jenderal Hortikultura. Kementerian Pertanian.

- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2012). *Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun Anggaran 2012*. Jakarta : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kementerian Pertanian.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. dkk. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Cetakan Ketiga, Mei 2008.
- Harmadi., S. H. B. (2011). *Buku Materi Pokok : Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka.
- Hendra, N. (2013). Implementasi Kebijakan. Diunduh dari [www.slideshare.net/Hennov/implementasi-kebijakan](http://www.slideshare.net/Hennov/implementasi-kebijakan). Tanggal 3 Januari 2013.
- Irianto, L. B. (2004). *Administrasi Publik dan Kebijakan Publik, Efektivitas Organisasi*. Disampaikan dalam seminar akademik FISIP-UT, tanggal 26 Mei 2004 : Jakarta.
- Kartasasmita, G. (2013). *Revitalisasi Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, diunduh dari: <http://www.stialan.ac.id/orasi%20ginanjar.pdf> tanggal 12 Oktober 2010.
- Kasmadi. (2005). *Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat terhadap Kemandirian Petani Ternak*. (Kasus pada Kelompok Tani Ternak Desa Bungai Jaya dan Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah). Bogor : Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Kirdar, U. dan Silk, L. (ed.). (2010). *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press
- Kurniawan. (2009). *Model dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan*. Diunduh dari <http://hykurniawan.wordpress.com/2009/07/30/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keberhasilan-implementasi-kebijakan/>. Tanggal 20 September 2014



- Lembaga Administrasi Negara RI, ( 2005 ). SANKRI, Buku III – *Landasan dan pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mark, M. M. (2000). *Evaluation: An integrated framework for understanding, guiding and improving public and nonprofit policies and programs*. San Fransisco : Jossey-Bass.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Montgomery, J. D. (1988). *Bureaucrats and People: Grassroots Participation in Third World Development*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Mustopadidjaya, (2005), *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara - Duta Pertiwi Foundation.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernologi: Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugrayasa, O. (2012). *Lima Masalah Yang Membelit Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Diunduh dari [http : // setkab . go . id/ artikel - 5746 - . html](http://setkab.go.id/artikel-5746-.html). Tanggal 15 September 2012.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2011
- Silalahi., U. (2007). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Alqensindo
- Subarsono (2006). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Apikasi)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. (2011). *Landasan Teori Evaluasi Kebijakan*. Diunduh dari [2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-evaluasi-kebijakan.html](http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-evaluasi-kebijakan.html). Tanggal 15 September 2012
- Sulaeman, A. (1998). *Public Policy, Kebijakan Pemerintah*. Kerjasama UNPAD – IIP, Bandung

Syahyuti. (2012). *Sejarah Kredit Pertanian Indonesia*. Diunduh dari kontraberita.blogspot.com/2012/05/sejarah-kredit-pertanian-indonesia.html. Tanggal 5 September 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Wibawa, S. (1994), *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia,.

Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia Publishing.

Witaradya, K. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn The Policy Implementation Process*. Diunduh dari kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process. Tanggal 14 Oktober 2013.

## LAMPIRAN

**BIODATA PENELITI**

Nama/NIM : Muhammad Maryono S./018399129  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kabupaten Pasir, 18 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Anggota Keluarga :  
Istri : Eva Rahmifa  
Anak : 1. Muhammad Alfath Rayyan  
2. Muhammad Dafi Hilmi  
3. Adwah Dirayah Bilqis  
4. Raesha Tara Marva  
Alamat Rumah dan Telp. : Jl. Teuku Umar 41 RT.12 Kecamatan Nunukan  
Tengah Kabupaten Nunukan  
No. Hp. : 08125363976  
Alamat email : yoyons@gmail.com  
Pengalaman Pendidikan : Sarjana Pertanian (Universitas Mulawarman)  
Pengalaman Pekerjaan : Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana  
Prasarana dan Pasca Panen Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten  
Nunukan  
Prestasi atau Penghargaan yang pernah diraih : -

Nunukan, Agustus 2013  
Peneliti,

**Muhammad Maryono S.**

**FORMULIR KUESIONER**

JUDUL PENELITIAN : EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL  
PERTANIAN DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN  
2008-2013

PENELITI : MUHAMMAD MARYONO S.

RESPONDEN/NARASUMBER :

JABATAN :

TANDA TANGAN :

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA

2013

## PERNYATAAN

1. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?

Sangat Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju

2. Apakah usaha yang telah dilakukan sudah maksimal untuk mencapai hasil yang diinginkan

Sangat Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju

3. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?

Sangat Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju

4. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?

Sangat Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju

5. Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

Sangat Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju

## FORMULIR WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN : EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN  
SOSIAL PERTANIAN DI KABUPATEN  
NUNUKAN TAHUN 2008-2013

PENELITI : MUHAMMAD MARYONO S.

RESPONDEN/NARASUMBER :

JABATAN :

TANDA TANGAN :

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2013



**PANDUAN WAWANCARA**

1. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?
4. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?
5. Apakah hasil ( tujuan ) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai ?

**JAWABAN :**

Tabel 1 Program/Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Per Subsektor di Kabupaten Nunukan Tahun 2008-2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBSEKTOR	THN	AGG	PAGU
1	Kegiatan Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P)	Tanaman Pangan	2008	APBN	Rp 727.435.000
2	Kegiatan Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P)	PLA	2008	APBN	Rp 1.488.000.000
3	Program Ketahanan Pangan Penanganan dan Pengendalian wabah virus Flu Burung pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (TP)	Peternakan	2008	APBN	Rp 710.000.000
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Hortikultura	2008	APBN	Rp 264.000.000
5	Program Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	PPHP	2009	APBN	Rp 600.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBSEKTOR	THN	AGG	PAGU
6	Program Pengembangan Agribisnis	Peternakan	2009	APBN	Rp 830.000.000
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Hortikultura	2009	APBN	Rp 220.000.000
8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (TP)	PLA	2009	APBN	Rp 3.686.000.000
9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tanaman Pangan	2009	APBN	Rp 1.311.929.000
10	Program Pengembangan Agribisnis	Hortikultura	2010	APBN	Rp 305.000.000
11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (TP)	PSP	2010	APBN	Rp 730.000.000
12	Program Pengembangan Agribisnis	Tanaman Pangan	2010	APBN	Rp 469.625.000
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	PSP	2011	APBN	Rp 2.181.250.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBSEKTOR	THN	AGG	PAGU
14	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Swasembada Berkelanjutan	Tanaman Pangan	2011	APBN	Rp 419.500.000
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	PSP	2012	APBN	Rp 2.534.700.000
16	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (TP)	Tanaman Pangan	2012	APBN	Rp 653.500.000
17	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Hortikultura	2012	APBN	Rp 2.110.000.000
					Rp 19.240.939.000

Sumber : Data Penelitian, diolah

Tabel 2. Kelompok Tani Penerima Kegiatan Bantuan Sosial Pertanian Tahun 2008-2012

No	Kelompok Tani	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Sub Sektor	Kegiatan Utama	Tahun	Volume	Keterangan
1	Setia Kawan II	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2009	8 ha	Durian
2	Setia Kawan II	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2009	2 ha	Jeruk keprok
3	Limau	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2009	5 ha	Durian
4	Limau	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2009	1 ha	Jeruk keprok
5	Tunas Reski	Mansapa	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kebun Benih	2009	1 unit	Penangkar benih durian dan jeruk keprok
6	Hidup Bersama	Mansapa	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2010	20 ha	

Lanjutan Tabel 2.

7	Abadi Usaha	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kebun Benih	2010	50 bibit	Pohon induk
8				Hortikultura	SL GAP	2010	8 KT	
9	Mekar Jaya	Selisun	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2012	25 ha	
10	Karya Mandiri	Paguluyon	Sembakung	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2012	20 ha	
11	Gapoktan Lestari	Saduman	Sembakung	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2012	25 ha	
12	Netral Abadi	Sei. Manurung	Sebatik	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2012	15 ha	
13	Hidup Bersama II	Selisun	Nunukan Selatan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2012	25 ha	
14	Batang Kara	Binusan	Nunukan	Hortikultura	Pengembangan Kawasan	2012	10 ha	
15	Netral Abadi	Sei. Manurung	Sebatik	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
16	Sentosa	Balansiku	Sebatik Barat	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
17	Tunas Harapan	Bambangan	Sebatik Barat	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok

Lanjutan Tabel 2.

18	Karya Mandiri	Paguluyon	Sembakung	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
19	Gapoktan Lestari	Saduman	Sembakung	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
20	Mekar Jaya	Selisun	Nunukan Selatan	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
21	Hidup Bersama	Mansapa	Nunukan Selatan	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
22	Rezky	Mansapa	Nunukan Selatan	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
23	Batang Kara	Binusan	Nunukan	Hortikultura	SL GAP	2012		Jeruk keprok
24	Hijau Lestari	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	Hortikultura	SL GAP	2012		Durian
25	Fajar	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	Hortikultura	SL GAP	2012		Durian
26	Jaya Sailong	Setabu	Sebatik Barat	Hortikultura	SL GAP	2012		Durian
27	Sahabat	Liang Bunyu	Sebatik Barat	Hortikultura	SL GAP	2012		Durian
28	Sinar Jaya	Sei. Pancang	Sebatik Utara	Hortikultura	SL GAP	2012		Durian
29	Netral	Sei. Limau	Sebatik Tengah	Hortikultura	SL GAP	2012		Durian

Lanjutan Tabel 2.

30	Gapoktan Bersama	Bina	Binalawan	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2008	500	ha	Jaringan irigasi
31	Bina Salam		Liang Bunyu	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2008	1	unit	Pengembangan embung
32	Sepakat		Pancang	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2008	1	unit	Pengembangan embung
33	Gapoktan Bersama	Bina	Binalawan	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Lahan	2008	2	km	Jalan usaha tani
34	Setia Kawan		Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Lahan	2008	15	ha	Optimasi lahan
35	Cahaya Semengkadu		Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Lahan	2008	15	ha	Optimasi lahan
36	Mekar Abadi		Tanjung Karang	Sebatik	PSP	Perluasan Areal	2008	50	ha	Lahan hortikultura
37	Hijau Lestari		Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	PSP	Perluasan Areal	2008	20	ha	Lahan hortikultura
38	Sinoulun		Binusan	Nunukan	PSP	Perluasan Areal	2008	15	ha	Perluasan areal peternakan

Lanjutan Tabel 2.



39	Sumber Rezeki	Binusan	Nunukan	PSP	Perluasan Areal	2008	5 ha	Perluasan areal peternakan
40	Jaya Makmur	Mansapa	Nunukan Selatan	PSP	Perluasan Areal	2008	7 ha	Perluasan areal peternakan
41	Sinar Harapan		Sebatik	PSP	Perluasan Areal	2008	8 ha	Perluasan areal peternakan
42	Sipurenmu	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	PSP	Perluasan Areal	2008	10 ha	Perluasan areal peternakan
43	Inbaya Intugos		Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Jaringan irigasi
44	Mattirowali		Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Jaringan irigasi
45	Sinar Harapan		Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Pengembangan embung
46	Karya Bersama		Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Pengembangan embung
47	Sinar 2000		Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Pengembangan embung

Lanjutan Tabel 2.

48	Sinoulun	Binusan	Nunukan	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Pengembangan embung
49	Jaya Makmur	Mansapa	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Pengembangan embung
50	Sipurenmu	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2009	1 unit	Pengembangan embung
51	Seiring Bersama		Sebatik	PSP	Pengelolaan Lahan	2009	2 km	Jalan usaha tani
52	Polewali	Tanjung Cantik	Nunukan	PSP	Pengelolaan Lahan	2009	2 km	Jalan usaha tani
53	Sahabat	Liang Bunyu	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Lahan	2009	20 ha	Optimasi lahan
54	Gapoktan Cahaya Seimengkadu	Tanjung Harapan	Nunukan	PSP	Perluasan Areal	2009	200 ha	Percetakan sawah
55	Sahabat	Liang Bunyu	Sebatik	PSP	Perluasan Areal	2009	25 ha	Lahan hortikultura
56	Mekar Abadi	Tanjung Karang	Sebatik	PSP	Perluasan Areal	2009	25 ha	Lahan hortikultura

Lanjutan Tabel 2.

57	Mamminasae	Tanjung Aru	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2010	100	ha	Jaringan irigasi
58	Seribu Temunung	Atap	Sembakung	PSP	Pengelolaan Air	2010	100	ha	Jaringan irigasi
59	Tujuh Lima II	Selisun	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2010	1	unit	Jaringan irigasi
60	Tunas Muda Jaya	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2010	1	unit	Jaringan irigasi
61	Gapoktan Cahaya Seimengkadu	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2010	1	unit	Jaringan irigasi
62	Tani Jaya	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2010	1	unit	Pengembangan embung
63	Bulan Purnama	Sekapal	Nunukan	PSP	Perluasan Lahan	2010	30	ha	Optimasi lahan
64	Jaya Indah		Sebatik	PSP	Perluasan Areal	2010	25	ha	Lahan hortikultura
65	Harapan Sekapal	Jaya Sekapal	Nunukan	PSP	Perluasan Areal	2010	25	ha	Lahan hortikultura

Lanjutan Tabel 2.

66	Batik Falad B	Pa' Loo	Lumbis	PSP	Pengelolaan Air	2011	60	ha	Jaringan irigasi
67	Mattirowali	Binusan	Nunukan	PSP	Pengelolaan Air	2011	14	ha	Jaringan irigasi
68	Makmur	Seberang	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2011	30	ha	Jaringan irigasi
69	Sumber Hidup	Seberang	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2011	30	ha	Jaringan irigasi
70	Bina Salam	Liang Bunyu	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2011	24	ha	Jaringan irigasi
71	Sinar 2000	Lapri	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2011	31	ha	Jaringan irigasi
72	Putra Kembar	Tanjung Karang	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2011	11	ha	Jaringan irigasi
73	Pandan Wangi	Atap	Sembakung	PSP	Pengelolaan Air	2011	167	ha	Jaringan irigasi
74	Gapoktan Intimung	Lubakan	Sembakung	PSP	Pengelolaan Air	2011	33	ha	Jaringan irigasi

Lanjutan Tabel 2.

75	Bina Mahesa	Liang Bunyu	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2011	1 unit	Pengembangan embung
76	P3A		Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2011	1 paket	Irigasi partisipatif
77	Gapoktan Cahaya Sungai Ular	Sekadayun Taka	Nunukan	PSP	Perluasan Areal	2011	100 ha	Percetakan sawah
78	Kejar Usaha Tani	Mansapa	Nunukan Selatan	PSP	Perluasan Areal	2011	25 ha	Lahan hortikultura
79	Bulan Purnama	Sekadayun Taka	Nunukan	PSP	Perluasan Areal	2011	25 ha	Lahan hortikultura
80	Mattirobulu	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	PSP	Pupuk dan Pesticida	2011	1 unit	Unit pengolahan pupuk organik
81	Bulan Purnama	Sekadayun Taka	Nunukan	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan sumber air
82	Hidup Bersama	Mansapa	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan sumber air
83	Karya Abadi II	Setabu	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan sumber air

Lanjutan Tabel 2.

84	Tenguyun	Liang Bunyu	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2012	32 ha	Jaringan irigasi
85	Sumber Hidup	Seberang	Sebatik Utara	PSP	Pengelolaan Air	2012	30 ha	Jaringan irigasi
86	Sinar Waru	Tanjung Harapan	Sebatik Timur	PSP	Pengelolaan Air	2012	25 ha	Jaringan irigasi
87	Mattirowali Bersatu	Tanjung Harapan	Sebatik Timur	PSP	Pengelolaan Air	2012	25 ha	Jaringan irigasi
88	Seiring Bersama	Tanjung Karang	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2012	20 ha	Jaringan irigasi
89	Bones	Bukit Aru Indah	Sebatik Timur	PSP	Pengelolaan Air	2012	50 ha	Jaringan irigasi
90	Maju Wijaya	Tanjung Karang	Sebatik	PSP	Pengelolaan Air	2012	15 ha	Jaringan irigasi
91	Gapoktan Bina Bersama	Binalawan	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2012	300 ha	Jaringan irigasi
92	Sawito	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2012	46 ha	Jaringan irigasi

Lanjutan Tabel 2.

93	Fajar	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2012	30 ha	Jaringan irigasi
94	Tunas Bagu	Binusan	Nunukan	PSP	Pengelolaan Air	2012	30 ha	Jaringan irigasi
95	Suka Maju	Binusan	Nunukan	PSP	Pengelolaan Air	2012	30 ha	Jaringan irigasi
96	Mekar Sari	Atap	Sembakung	PSP	Pengelolaan Air	2012	67 ha	Jaringan irigasi
97	Sinar Pancang	Seberang	Sebatik utara	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan embung
98	Mandiri	Binusan	Nunukan	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan embung
99	Sinar Jaya	Pancang	Sebatik utara	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan embung
100	Mattirobulu	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan embung
101	Karya Abadi II	Bambangan	Sebatik Barat	PSP	Pengelolaan Air	2012	1 unit	Pengembangan embung

Lanjutan Tabel 2.

102	Gapoktan Pelangi Nusantara	Binusan	Nunukan	PSP	Perluasan Areal	2012	100	ha	Percetakan sawah
103	Batu Fagan	Sembudud	Krayan	PSP	Perluasan Areal	2012	20	ha	Peternakan
104	Bina Lestari	Binalawan	Sebatik Barat	Tanaman Pangan	Pengembangan Pupuk	2008	1	paket	
105			Sebatik	Tanaman Pangan	Pengembangan Perbenihan	2008	100	ha	
106	Usaha Sama		Sebatik	Tanaman Pangan	SL PTT	2008			
107	Sejahtera	Mansapa	Nunukan Selatan	Tanaman Pangan	Pengembangan Pupuk	2009	1	unit	
108	Sipurenmu	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	Tanaman Pangan	Pengembangan Pupuk	2009	1	unit	
109	Surya Abadi Sebatik	Pancang	Sebatik	Tanaman Pangan	Pengembangan Pupuk	2009	1	unit	
110	Maspul Jaya	Mansapa	Nunukan Selatan	Tanaman Pangan	Mekanisasi	2009	5	unit	Hand traktor

Lanjutan Tabel 2.



111	Sumber Hidup	Pancang	Sebatik	Tanaman Pangan	Mekanisasi	2009	5 unit	Hand traktor
112	Gapoktan Cahaya Seimengkadu	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	Tanaman Pangan	Pengembangan Pupuk	2010	1 unit	Pengolah pupuk organik
113	Samaenre	Seimenggaris	Nunukan	Peternakan	Agribisnis	2008	18 ekor	Sapi
114	Dharma Bakti	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Peternakan	Ketahanan Pangan	2008	500 ekor	Itik
115	Baldatun Toyyibah	Selisun	Nunukan Selatan	Peternakan	Ketahanan Pangan	2008	500 ekor	Itik
116	Kampung Solo Maju	Binusan	Nunukan	Peternakan	Peningkatan Produksi	2008	82 ekor	Sapi
117	Serumpun		Nunukan	Peternakan	Agribisnis	2009	9 ekor	Sapi
118	Sinar Apala	Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	Peternakan	Peningkatan Produksi	2009	ekor	Sapi

Lanjutan Tabel 2.

119	Gapoktan Bersama	Binalawan	Sebatik Barat	PPHP	Pengembangan Agribisnis	2009	1 paket	Box dryer, mesin jahit karung, sabit berrgerigi, timbangan, power threser
120	Surya Abadi Sebatik	Pancang	Sebatik	PPHP	Peningkatan Ketahanan Pangan	2009	1 paket	Kendaraan Panen, gerobak, keranjang panen, terpal,
121	Sejahtera	Paguluyon	Sembakung	PPHP	Peningkatan Ketahanan Pangan	2009	1 paket	Parang, pisau, karung, sarung tangan, keranjang sortasi,
122	Cahaya Terang	Katul	Sembakung	PPHP	Peningkatan Ketahanan Pangan	2009	1 paket	Baskom, gunting panen, alat ukur gula buah, timbangan

Sumber : Data Penelitian, diolah